



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2017



Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017**

Disusun Oleh:
Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Y. NOVIAR ISHAK

NIP. 19601124 199003 1 004

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Selaku Ketua Pokja PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Disahkan Oleh

**GOVERNOR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



ERZALDI ROSMAN

Diverifikasi Oleh

Plh. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



H.K.A. TAJUDDIN, SH., M.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640324 199001 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan ***Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*** dapat berjalan lancar dengan tepat waktu.

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemahaman ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Kondisi perumahan dan permukiman yang layak, dapat diwujudkan dengan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang sinergis dan melingkupi berbagai sektor (multisektor) dimana hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar menyangkut taraf kesejahteraan hidup masyarakat. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 nomor 6 menyebutkan bahwa “penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan **perencanaan**, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan **kelembagaan**, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu, yang dijabarkan sebagai satu proses yang terpadu dan terkoordinasi”.

Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) harus sejalan dengan pembangunan sektor lain, supaya terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut Pemerintah Daerah perlu memiliki ‘**Grand Design**’ **penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman** yang disebut sebagai **Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)**.

RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor dengan peruntukan penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur secara khusus ruang PKP serta berbagai tindak lanjutnya. Hal yang turut mendasari Pemerintah Provinsi perlu menyusun RP3KP adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 14 huruf f dan Pasal 15 huruf c yang mengamanatkan tugas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun RP3KP;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penjelasan Pasal 97 Ayat (1) huruf f tentang Rencana Sektor;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang urusan wajib pemerintah daerah.
5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 menyiapkan Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dijadikan acuan dalam analisis dan perumusan (konsep dan rencana) Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman di tahun 2018.

Melalui profil ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pemangku kepentingan dalam mendukung Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Pangkalpinang, September 2017
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	8
Daftar Gambar	10
BAB I GAMBARAN UMUM LOKASI DAN KARAKTERISTIK WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	11
BAB II KONDISI POTENSI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14
2.1. Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005 - 2025	14
2.2. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034.....	17
2.2.1. Arah Kebijakan Penataan Ruang	17
2.2.2. Rencana Struktur dan Pola Ruang	19
2.3. Kondisi Demografi.....	26
2.4. Topografi	28
2.5. Geologi	29
2.6. Hidrologi	30
2.7. Penggunaan Lahan	31
2.8. Wilayah Rawan Bencana	32
2.9. Budaya Bermukim Masyarakat	34
2.9.1. Desain Bentuk Rumah Adat Bangka Belitung	35
2.9.2. Suku Adat Bangka Belitung	36
2.10. Kondisi Perumahan dan Permukiman	41
2.10.1. Sebaran Perumahan dan Permukiman	41
2.10.2. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Dalam Satu Rumah	42
2.10.3. Jumlah Sambungan Listrik Rumah (PLN)	43
2.10.4. Jumlah Pembangunan Rumah dalam Satu Tahun	44
2.10.5. Rumah Tidak Layak Huni	45
2.10.5.1. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka	46

2.10.5.2. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka Barat	47
2.10.5.3. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka Tengah	48
2.10.5.4. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka Selatan	49
2.10.5.5. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Belitung	50
2.10.5.6. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Belitung Timur	51
2.10.5.7. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pangkalpinang	52
2.10.6. Sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	53
2.10.6.1. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Pangkalpinang	54
2.10.6.2. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bangka Tengah	55
2.10.6.3. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bangka	55
2.10.6.4. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Bangka Barat	56
2.10.6.5. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Bangka Selatan	56
2.10.6.6. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Belitung	57
2.10.6.7. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Belitung Timur.....	57
2.11. Ketersedian dan Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	58
2.11.1. Ketersedian dan Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ...	58
2.11.2. Ketersedian dan Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum lokasi kumuh	60
2.11.3. Ketersedian dan Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kabupaten Bangka	62
2.11.4. Ketersedian dan Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kabupaten Bangka Barat	65
2.11.5. Ketersedian dan Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kabupaten Belitung	67
2.11.6. Ketersedian dan Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kabupaten Belitung Timur	69

2.11.7. Ketersedian dan Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
Kota Pangkalpinang	71
2.12. Akses Terhadap Sanitasi Layak	74
2.13. Akses Air Minum	74
2.14. Tipologi Perumahan dan Permukiman	75

DAFTAR TABEL

1.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Serta Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016	13
2.1.1.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD 2005 – 2025	14
2.1.2.	Keterkaitan Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahap III dan IV (2017-2025)	15
2.1.3.	Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahap III (2017-2022) dan Tahap II (2022-2025)	17
2.2.2.	Rencana Sistem Pusat Permukiman Provinsi 2030	21
2.3.	Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	26
2.7.	Jenis dan Luas Penggunaan Lahan	31
2.8.1.	Data Bencana Alam Tahun 2013 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	33
2.8.2.	Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	33
2.10.1.1.	Backlog Kepemilikan dan Backlog penghunian	41
2.10.1.2.	Jumlah Rumah Tapak	41
2.10.1.3.	Jumlah Rumah Susun	42
2.10.2.1	Jumlah Rumah dengan 1 KK	42
2.10.2.2.	Jumlah Rumah dengan lebih dari 1 KK	43
2.10.3.	Jumlah Sambungan Listrik Rumah	43
2.10.4.	Pembangunan Rumah dalam Satu Tahun	44
2.10.5.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	45
2.10.5.1.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka	46
2.10.5.2.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka Barat	47
2.10.5.3.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka Tengah	48
2.10.5.4.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka Selatan	49
2.10.5.5.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Belitung	50
2.10.5.6.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Belitung Timur	51
2.10.5.7.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Pangkalpinang	52

2.10.6. Luas Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni dalam wilayah kumuh	53
2.10.6.1. Luas Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni dalam wilayah kumuh Kota Pangkalpinang	54
2.10.6.2. Luas Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni dalam wilayah kumuh Kabupaten Bangka Tengah	55
2.10.6.3. Luas Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni dalam wilayah kumuh Kabupaten Bangka	55
2.10.6.4. Luas Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni dalam wilayah kumuh Kabupaten Bangka Barat	56
2.10.6.5. Luas Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni dalam wilayah kumuh Kabupaten Bangka Selatan	56
2.10.6.6. Luas Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni dalam wilayah kumuh Kabupaten Belitung	57
2.10.6.7. Luas Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni dalam wilayah kumuh Kabupaten Belitung Timur	57
2.13 Akses Air Minum	74
2.14. Tipologi Perumahan dan Permukiman	75

DAFTAR GAMBAR

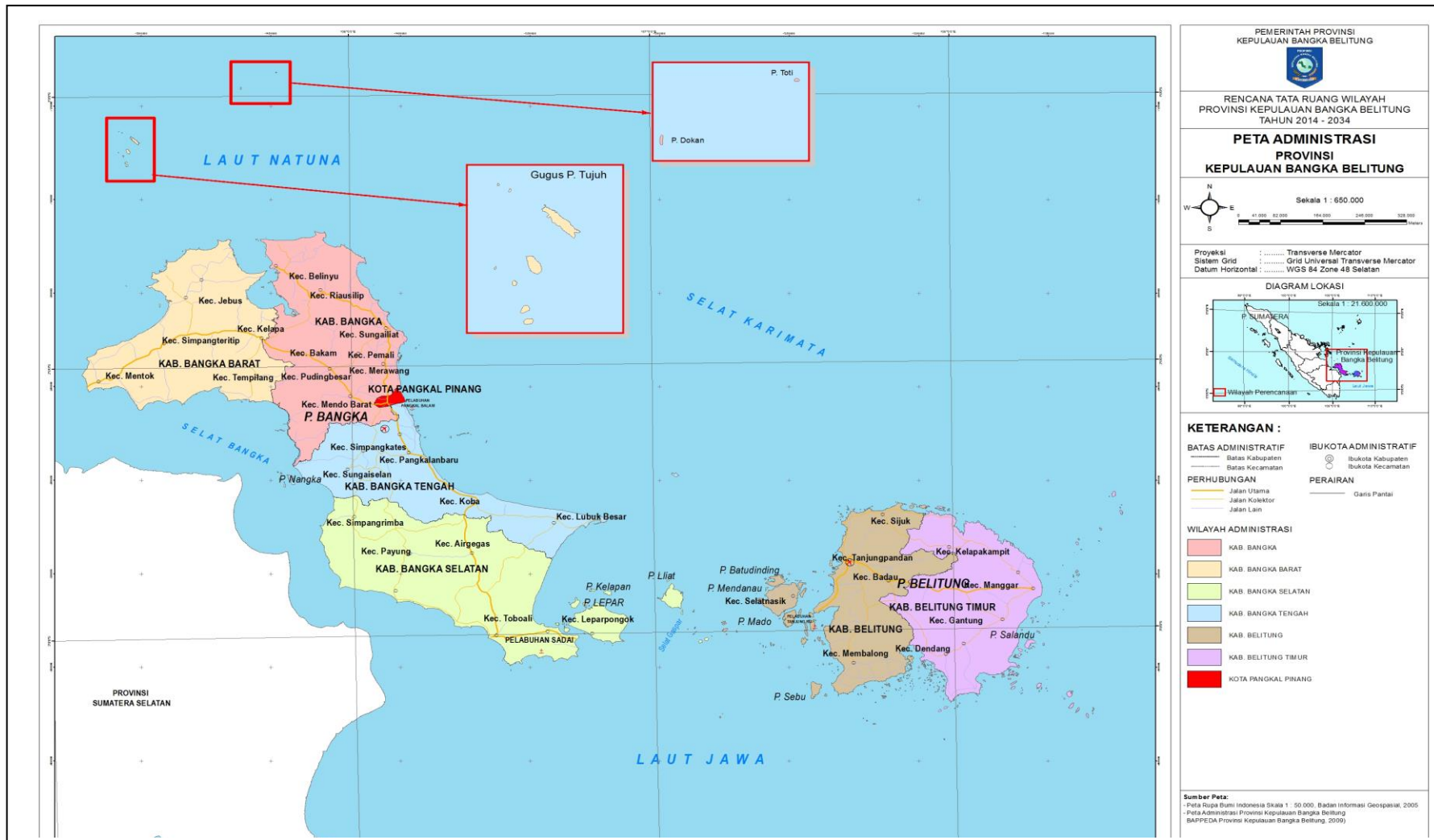
1.1.	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12
2.2.2.	Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	25
2.3.	Distribusi Persentase Luas Geografis dan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota	27
2.4.	Peta Topografi.....	28
2.5.	Peta Geologi	29
2.6.	Peta Barometri.....	30
2.7.	Peta Kesesuaian Lahan.....	32
2.8.	Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	34
2.12.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak	74

I. GAMBARAN UMUM LOKASI DAN KARAKTERISTIK WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 telah dibentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebelah Timur: Selat Karimata, sebelah Barat: Selat Bangka, sebelah Selatan: Laut Jawa, sebelah Utara: Laut Natuna. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,23 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,23 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Bangka dengan luas wilayah 2.950,69 km²; Kabupaten Bangka Barat dengan luas 2.820,61 km²; Kabupaten Bangka Tengah dengan luas 2.126,36 km²; Kabupaten Bangka Selatan dengan luas wilayah 3.607,08 km²; Kabupaten Belitung luas wilayah 2.293,69 km²; Kabupaten Belitung Timur 2.507 km² dan Kota Pangkalpinang dengan luas wilayah 118,80 km².

Kepulauan Bangka Belitung merupakan gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 1.1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan serta Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
Bangka	Sungai Liat	8	62	19	2.950,68
Bangka Barat	Muntok	6	60	4	2.280,61
Bangka Tengah	Koba	6	56	7	2.155,77
Bangka Selatan	Toboali	8	50	3	3.607,08
Belitung	Tanjungpandan	5	42	7	2.293,69
Belitung Timur	Manggar	7	39	-	2.506,91
Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	-	42	118,80
Luas Daratan					16.424,14
Luas Laut				65.301,00	
Provinsi Kep. Babel		47	309	82	81.725,14

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2017

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003. Dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2016 sebagai berikut:

- Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa.
- Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa.
- Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa.
- Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa.
- Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa.
- Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan, dan 39 desa.
- Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

II. KONDISI POTENSI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1. Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005 – 2025

Tabel. 2.1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD 2005-2025

VISI “Bangka Belitung Sebagai Provinsi Kepulauan yang Maju, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan 2025”				
No	Misi	Tujuan	Sasaran	
			Uraian	Indikator
1	Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah berbasis agri-bahari	Meningkatnya ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB
2	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	Mewujudkan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (69,55)
3	Mewujudkan pemerintahan yang amanah.	Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi (72,31)
			Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi
4	Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.	Mengurangi kesenjangan pembangunan sosial dan pembangunan antar wilayah	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson
				Indeks Gini (0,282)
5	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sumber: Perubahan RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025

Tabel 2.1.2. Keterkaitan Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahapn III dan IV (2017-2025)

MISI DAERAH	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Misi 1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agribahari	Meningkatnya ekonomi Daerah	1 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
		2 Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sector pembangunan;
		3 Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
		4 Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah;
		5 Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan SDA;
		6 Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
		7 Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
		8 Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
		9 Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
		10 Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
		11 Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
		12 Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
		13 Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
		14 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan industri pariwisata;
		15 Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan promosi, destinasi dan pemasaran pariwisata;
		16 Peningkatan Nilai tambah atas pemanfaatan SDA berbasis kehutanan.
Misi 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	1 Peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing
		2 Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat;
		3 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan
		4 Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga Kesehatan
Misi 3. Mewujudkan pemerintahan yang	Meningkatnya Indeks	1 Pemeliharaan iklim demokrasi yang kondusif melalui pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri serta penguatan ketahanan masyarakat

MISI DAERAH	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
amanah	Demokrasi Indonesia Provinsi	2 Pengembangan kapasitas pemerintah daerah perlu dilakukan melalui peningkatan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi kebijakan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.
	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	1 Pembangunan pemerintahan umum diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan public yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah melalui penataan dan pemberdayaan birokrasi yang bersih, responsive dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean government didukung dengan pendataan dan perencanaan komprehensif, peningkatan kapasitas, kualitas dan produktifitas sumber daya aparatur; pembangunan fasilitas-fasilitas publik dan penempatan aparatur hingga ke daerah-daerah dan pulau-pulau terpencil dan sulit dijangkau dalam upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat; serta menekantingkat penyalahgunaan wewenang pada semua lapisan birokrasi; 2 Meningkatkan Rasio Belanja Publik terhadap Belanja Aparatur yang mengarahkan kebijakan keuangan pada upaya untuk perbaikan system pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, demokratis, responsif, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis; mendorong terciptanya kemandirian fiskal dengan mendorong pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah untuk sebesar mungkin kemakmuran masyarakat
Misi 4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	1 Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa;
		2 Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang tertinggal, Strategis cepat tumbuh, perbatasan serta daerah potensial lainnya;
		3 Pembangunan dan pengembangan infrastruktur
		4 Peningkatan akses informasi, pemasaran, permodalan, kesempatan kerja dan teknologi;
		5 Pengembangan kawasan Transmigrasi dan Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi;
		6 Pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW;
		7 Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas;
		8 Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar public
		9 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan

MISI DAERAH	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
		pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan;
		10 Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan Penduduk;
		11 Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan prestasi olah raga;
		12 Pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan karakter lokal dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul;
		13 Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG);
		14 Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Misi 5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	1 Menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air agar terwujud kemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat baik pada generasi sekarang maupun akan datang.
		2 Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Sumber: Perubahan RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025

Tabel 2.1.3. Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahap III (2017-2022) dan Tahap II (2022-2025)

Sasaran Pokok		Prioritas Lima Tahunan	
		2017–2022	2022–2025
1	Meningkatnya ekonomi daerah	I	I
2	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	II	II
3	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	III	III
4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	IV	IV
5	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan Masyarakat	V	V
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	VI	VI

2.2. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034

2.2.1. Arah Kebijakan Penataan Ruang

Tujuan Penataan Ruang provinsi adalah **"Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan**

berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan ”

Agar terdapat kesamaan pemahaman bagi para pihak yang berkepentingan dengan penataan ruang, berikut penjelasan rumusan tujuan diatas.

Terpadu; terbangunnya sistem ekonomi wilayah dalam suatu kesatuan sistem perkotaan yang saling terkait dan sinergis, dimana masing-masing pusat perkotaan mempunyai fungsi utama yang berbeda namun saling mendukung satu sama lain.

Berimbang; terciptanya kesetimbangan ekosistem wilayah (*ecoregion*) dan ketidaktimpangan pembangunan antar wilayah

Berkeadilan; terciptanya pemerataan pembangunan baik dari sisi spasial (ruang) maupun sosial (perorangan atau kelompok) dengan memperhatikan bobot hak dan kewajiban kelompok atau perorangan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Agro-Bahari; kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan yang berifat hulu hilir dijadikan sebagai basis penumbuhkembangan ekonomi wilayah (lokomotif ekonomi)

Wisata; wisata yang dikembangkan adalah wisata yang berbasis budaya, *heritage* dan bahari

Pertambangan; pertambangan timah merupakan basis utama kegiatan ekonomi wilayah di Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini tetap dipertahankan dengan lebih memperhatikan (mengurangi) dampak terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial maupun fisik.

Berkelanjutan; yang dimaksud disini adalah pembangunan berkelanjutan dimana kegiatan pembanguan pada segala bidang dikembangkan secara intensif namun tetap menjaga kualitas lingkungan masa kini dan masa mendatang serta berkeadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang diatas dilaksanakan kebijakan sebagai berikut.

1. **Penguatan karakter** dan potensi unggulan pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu sistem perkotaan yang terpadu;
2. **Pengembangan ekonomi wilayah** melalui perwilayahan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi berbasis agro-bahari;
3. Pengembangan sektor **industri pengolahan hasil agro-bahari** yang didukung infrastruktur yang memadai;
4. Pengembangan **kepariwisataan yang berbasis budaya lokal**, *heritage* dan bahari serta ramah lingkungan;

5. **Pengelolaan pertambangan yang lebih ramah lingkungan** dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
6. **Pembangunan prasarana dan sarana wilayah** yang mendorong penguatan fungsi-fungsi pusat pertumbuhan dan produktivitas lahan; dan
7. **Penciptaan keseimbangan pembangunan** antar wilayah dan antar fungsi ruang dengan basis pembangunan berkelanjutan.

2.2.2. Rencana Struktur dan Pola Ruang

Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kepulauan Bangka Belitung

Sistem pusat permukiman di provinsi Kepulauan Bangka Belitung pengembangannya disesuaikan dengan arahan yang digariskan pada RTRWN dan RTRW Pulau Sumatera dan juga beberapa arahan yang direncanakan oleh kota/kabupaten di provinsi ini. Arahan dari masing-masing kota/kabupaten telah berdasarkan pada analisis detail ditingkat kota/kabupaten sebagai bagian tidak terpisahkan dan komplementer dari provinsi ini. Analisis yang dilakukan antara lain melibatkan ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan / fasilitas sosial ekonomi, orientasi pergerakan dan aspek lainnya.

rencana struktur ruang provinsi adalah sebagai berikut :

1. Kota dan kawasan perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjungpandan dan Manggar ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
2. Pelabuhan Laut Tanjungpandan ditetapkan fungsinya sebagai Pelabuhan Nasional yang merupakan pelabuhan utama tersier;
3. Bandara H.AS. Hanandjoeddin & Depati Amir ditetapkan fungsinya sebagai Bandara Pusat Penyebaran Tersier.

Pada sisi lain juga perlu memperhatikan tipe kawasan perkotaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2030 yaitu :

1. Kota-kota kecil, seperti: Muntok, Belinyu, Sungai Liat, Kelapa, Tanjungpandan, Sijuk, Membalong, Manggar, Kelapa Kampit dan Gantung, paling tidak harus menyediakan pelayanan berupa fasilitas Rumah Sakit Tipe D; Pasar Induk Lokal; dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Lokal; sedangkan
2. Kota Sedang seperti Pangkalpinang, paling tidak harus menyediakan pelayanan berupa fasilitas Rumah Sakit Tipe B; Pasar induk Regional dan TPA Regional. Sebagai ibukota

provinsi sebaiknya Kota Pangkalpinang diusulkan sebagai PKN sebagaimana umumnya ibukota provinsi di wilayah lain di Indonesia.

Dengan demikian rencana sistem permukiman untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. **PKNp** Pangkalpinang, selain sebagai ibukota provinsi juga menjadi orientasi bagi seluruh wilayah perkotaan di Kepulauan Bangka Belitung
2. **PKW Muntok**, menjadi orientasi bagi PKL Kelapa di Kabupaten Bangka Barat, Sungai Liat dan Belinyu di Kabupaten Bangka;
3. **PKW Tanjungpandan**, menjadi orientasi bagi PKL Sijuk dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
4. **PKW Manggar**, menjadi orientasi bagi PKL Kelapa Kampit dan Gantung di Kabupaten Belitung Timur.

PKWp yang direncanakan untuk Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. **PKWp Koba** (Kabupaten Bangka Tengah)
2. **PKWp Toboali** (Kabupaten Bangka Selatan)

PKL yang direncanakan untuk Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. **PKL Kelapa** (Kabupaten Bangka Barat)
2. **PKL Parittiga** (Kabupaten Bangka Barat)
3. **PKL Belinyu** (Kabupaten Bangka)
4. **PKL Sungailiat** (Kabupaten Bangka)
5. **PKL Sungai Selan** (Kabupaten Bangka Tengah)
6. **PKL Sijuk** (Kabupaten Belitung)
7. **PKL Membalong** (Kabupaten Belitung)
8. **PKL Badau** (Kabupaten Belitung)
9. **PKL Kelapa Kampit** (Kabupaten Belitung Timur)
10. **PKL Gantung** (Kabupaten Belitung Timur)
11. **PKL Puding Besar** (Kabupaten Bangka)
12. **PKL Pangkalanbaru** (Kabupaten Bangka Tengah)
13. **PKL Payung** (Kabupaten Bangka Selatan)
14. **PKL Selat Nasik** (Kabupaten Belitung)

Tabel 2.2.2 Rencana Sistem Pusat Permukiman Provinsi 2030

Fungsi Pusat	Pusat	Kabupaten/ Kota	Peran
PKNp	Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan Provinsi Kep. Bangka Barat, • Pusat perdagangan dan jasa regional • Pusat pendidikan& kesehatan regional • Pusat kebudayaan, dan pariwisata regional • Pusat pertumbuhan regional
PKW	Muntok	Kab. Bangka Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan Kab. Bangka Barat, • Pusat perdagangan dan jasa, • Pusat pendidikan& kesehatan, • Pusat kebudayaan, dan pariwisata.
	Tanjungpandan	Kab. Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan ekonomi regional (Belitung), pusat pembangkit tenaga listrik (PLTU) • Simpul peregrakan barang dan orang melalui laut (pelabuhan) • Pusat pengembangan pariwisata Belitung
	Manggar	Kab. Belitung	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pusat administrasi pemerintahan kabupaten, ○ Pusat perdagangan, jasa, dan pemasaran skala kabupaten, ○ Pusat pelayanan sosial ekonomi skala kabupaten, ○ Pusat pelayanan transportasi regional, ○ Pusat pengolahan, ○ Pusat pendidikan tinggi.
PKWp	Koba	Kab. Bangka Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pengolahan/ pengumpulan barang yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan tetangga; • Simpul transportasi yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga; • Jasa pemerintahan kabupaten/kota; serta • Pusat pelayanan publiknya untuk kabupaten dan beberapa kecamatan di kabupaten tetangga.

Fungsi Pusat	Pusat	Kabupaten/ Kota	Peran
	Toboali	Kab. Bangka Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Administrasi Pemerintahan (kabupaten, kecamatan, desa) • Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi • Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran • Pusat Perhubungan dan Komunikasi • Pusat Produksi Pengolahan • Pusat Pendidikan Tinggi
PKL	Kelapa	Kab. Bangka Barat	<ul style="list-style-type: none"> • pusat pemerintahan Kec. Kelapa, pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta pelayanan sektor pertanian dan perkebunan
	Parittiga		<ul style="list-style-type: none"> • pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta pelayanan sektor perkebunan dan perikanan
	Belinyu	Kab. Bangka	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan kecamatan • Pelabuhan Laut Regional • Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru • Adanya kegiatan Industri Perikanan Terpadu mendukung Kegiatan lainnya
	Sungailiat		<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan kecamatan • Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya • Wilayah pemasaran bagi produksi <i>hinterland</i> • Fungsi dan peran sebagai pusat Kabupaten Bangka akan turut menjadi pendorong perkembangan wilayah • Ketersediaan sarana prasarana yang relatif memadai • Pusat perdagangan & jasa • Kegiatan Wisata • Kesehatan • Pendidikan

Fungsi Pusat	Pusat	Kabupaten/ Kota	Peran
	Sungai Selan	Kab. Bangka Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan • Pusat pengembangan agropolitan
	Sijuk	Kab. Belitung	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat perdagangan dan jasa kedua setelah Tanjung Pandan • Pusat pengembangan perikanan • Pusat penembangan pariwisata
	Membalong		<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pengembangan agropolitan
	Badau		<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan kabupaten • Pusat pelayanan jasa
	Kelapa Kampit	Kab. Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat administrasi pemerintahan kecamatan, • Pusat perdagangan, jasa, dan pemasaran skala kawasan, • Pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan (beberapa kecamatan), • Pusat pelayanan transportasi skala kawasan/regional,
	Gantung	Kab. Belitung Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat permukiman perkotaan • Pusat pertanian
	Puding Besar	Kab. Bangka	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan kecamatan • Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian • Wilayah pemasaran bagi produksi <i>hinterland</i> • Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya • Agropolitan • Perkebunan
	Pangkalanbaru	Kab. Bangka Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan kecamatan • Pusat pelayanan transportasi (Bandar Udara) • Pusat perdagangan dan jasa
	Payung	Kab. Bangka Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Administrasi Pemerintahan (kabupaten, kecamatan, desa) • Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi • Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran
	Selat Nasik		<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pengembangan minapolitan

Sumber: RTRW Kota Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RTRW 2012

Kawasan Budidaya di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung terdiri dari:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi tetap;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- g. kawasan peruntukan permukiman.
- h. Kawasan peruntukan lainnya

Penjelasan terkait Kawasan Peruntukan Permukiman adalah sebagai berikut:

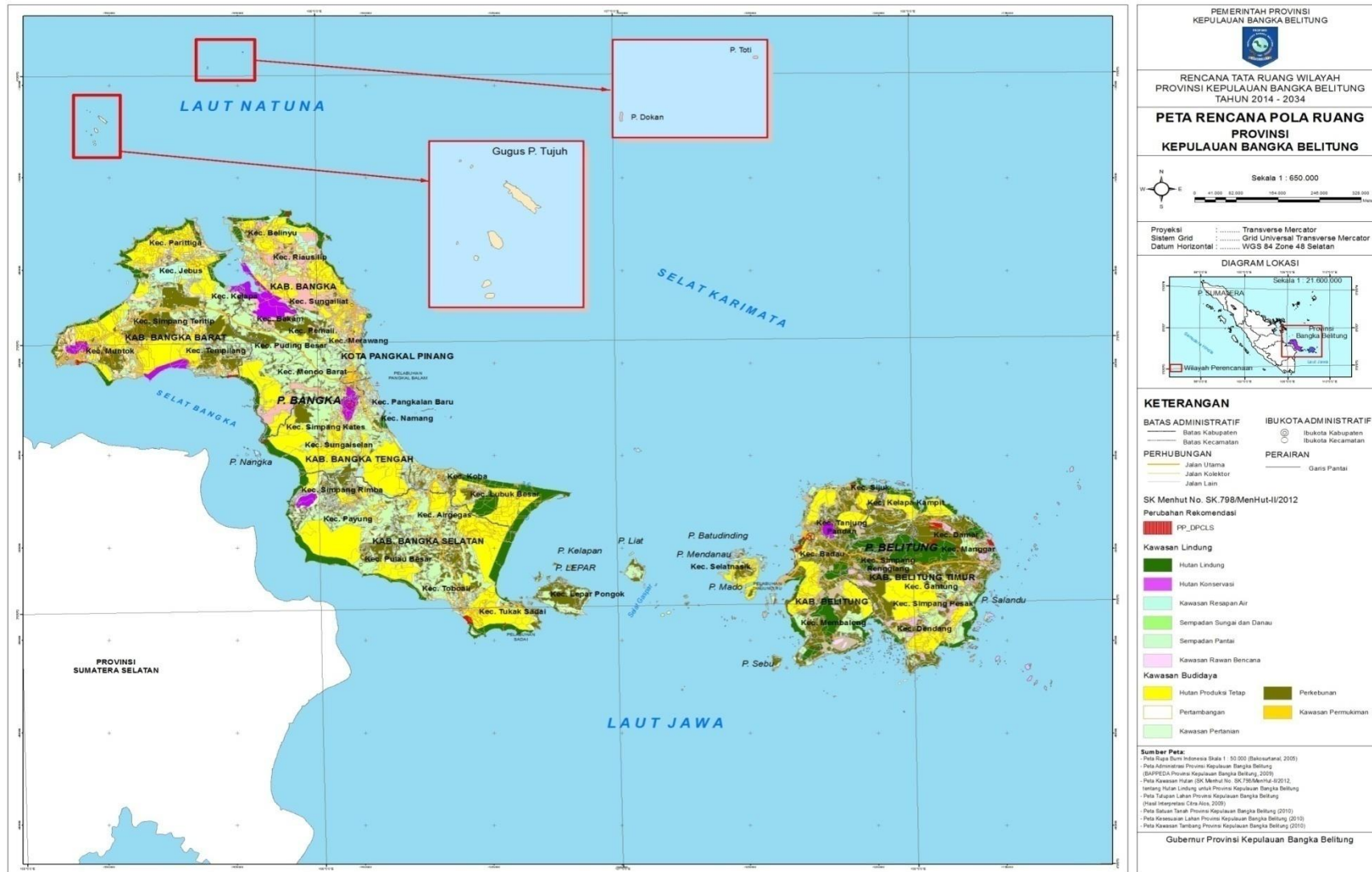
Kawasan permukiman ditetapkan dengan kriteria:

- a. didominasi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal;
- b. aman dari bahaya bencana alam atau bahaya bencana buatan manusia; dan
- c. akses menuju pusat kegiatan masyarakat baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan.
- d. Kriteria teknis kawasan permukiman ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permukiman.

Kawasan permukiman dibedakan menjadi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan/pelayanan seperti kawasan perkotaan Muntok, Sungailiat, Pangkalpinang, Koba, Toboali, Tanjungpandan dan Manggar. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan dikembangkan pada wilayah belakang (hinterland dari pusat-pusat permukiman yang disebut di atas.

Seperti umumnya kawasan permukiman perkotaan, selalu dikembangkan secara lebih efisien dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan prasarana permukiman yang memadai dan sebagian berbayar. Sementara itu, kendati juga harus disediakan kelengkapan prasarana permukiman yang memadai, namun intensitas untuk kawasan permukiman perdesaan tidak terlalu tinggi.

Secara lebih rinci Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dilihat secara grafis pada **Gambar 2.2.2** di bawah ini.



Gambar 2.2.2 Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.3. KONDISI DEMOGRAFI

Perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tiap tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

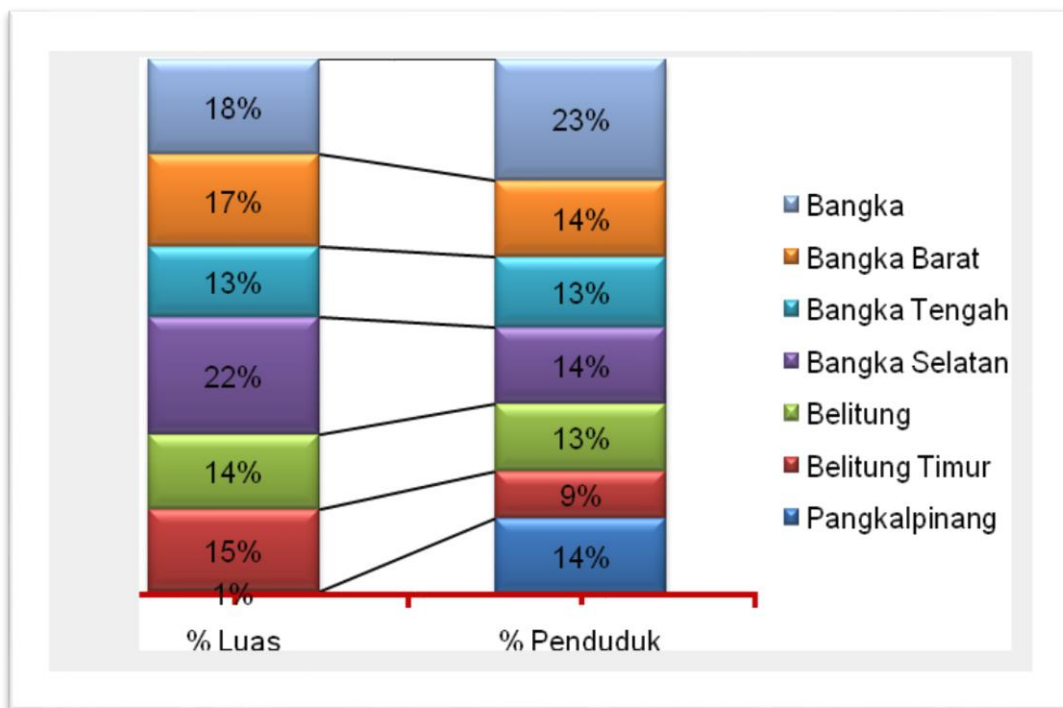
Tabel. 2.3. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bangka	165.529	152.206	317.735
Belitung	92.629	86.092	178.721
Bangka Barat	104.689	95.995	200.684
Bangka Tengah	96.781	87.939	184.720
Bangka Selatan	102.654	95.016	197.670
Belitung Timur	63.503	58.468	121.971
Pangkalpinang	102.795	97.531	200.326
Jumlah 2016	728.580	673.247	1.401.827
2015	713.223	659.590	1.372.813
2014	697.897	645.984	1.343.881
2013	682.653	632.470	1.315.123
2012	667.494	619.057	1.286.551
2011	652.446	605.788	1.258.234

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2017

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 sebesar 1.401.827 jiwa, dengan laju pertumbuhan 2015-2016 sebesar 2,11 persen. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2016 sebanyak 728.580 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 673.247 jiwa. Rasio jenis kelamin sebesar 108, artinya pada tahun 2016 untuk setiap 208 penduduk di Kepulauan Bangka Belitung terdapat 100 penduduk perempuan dan 108 penduduk laki-laki.

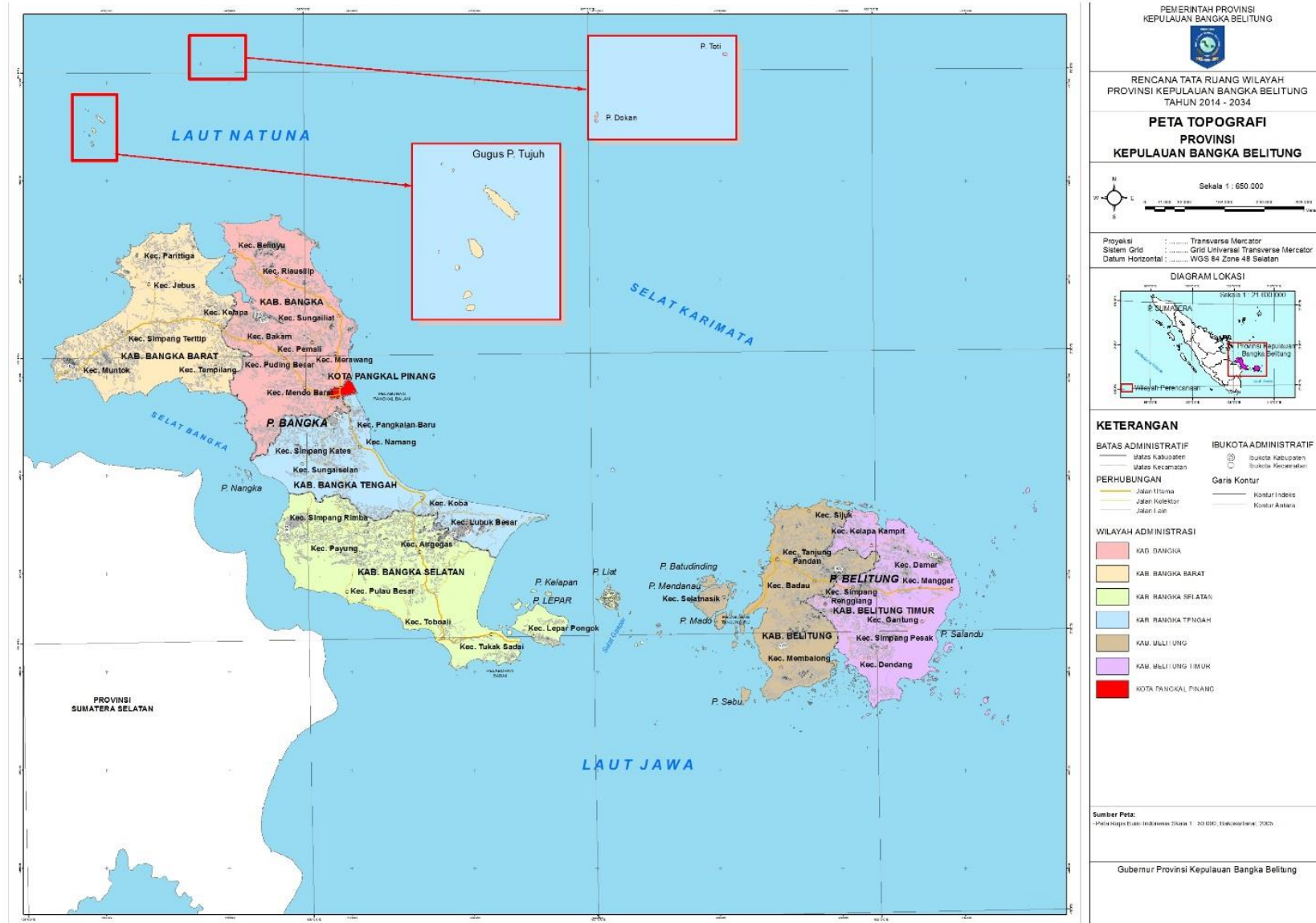
Adapun tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 82 orang per km². Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Pangkalpinang memiliki tingkat kepadatan tertinggi yaitu sebesar 1.616 orang per km² dan Kabupaten Belitung Timur memiliki tingkat kepadatan terendah yaitu 47 orang per km². Hal ini menggambarkan bahwa Kota Pangkalpinang yang luas geografisnya hanya 1% dihuni oleh 14% penduduk. Distribusi persentase luas geografis dan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Grafik 2.3.



Gambar 2.3.
Distribusi Persentase Luas Geografis dan Penduduk
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota

2.4. Topografi

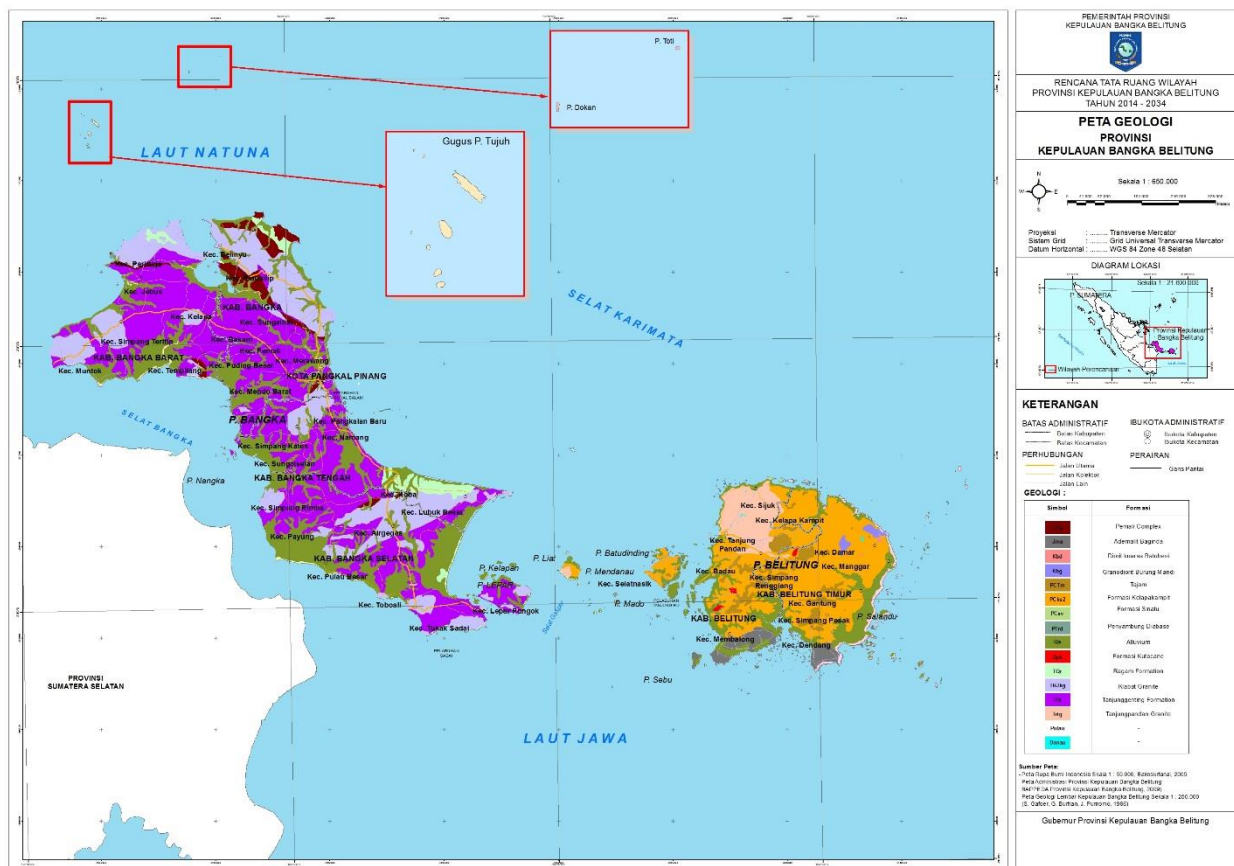
Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut. Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai dari dataran, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat disebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.



Gambar 2.4 Peta Topografi

2.5. Geologi

Kondisi geologi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pengembangan. Hampir diseluruh wilayah. Material timah (tin), Kaolin, Kuarsa (quartz), dan bilitonite (dikenal dengan nama "satam"). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

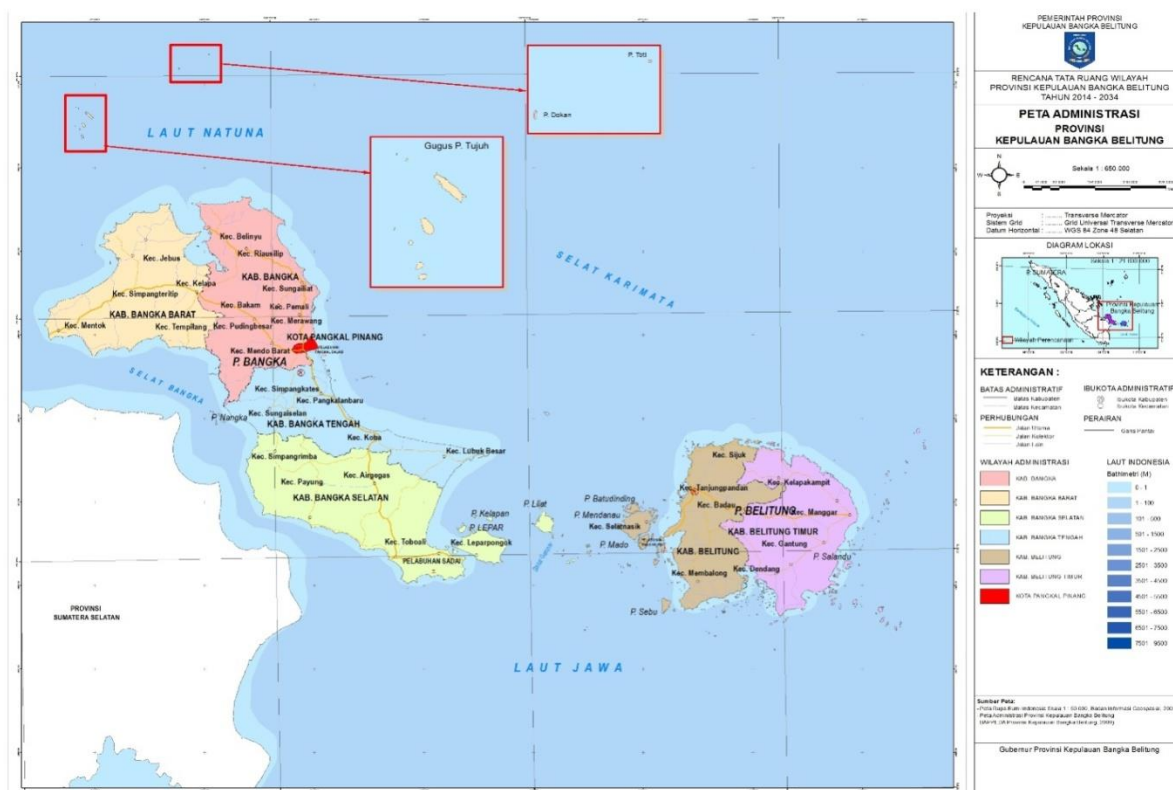


Gambar 2.5 Peta Geologi

2.6. Hidrologi

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara,

Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai antara lain : Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Kotawaringin, Sungai Ajang Mabat dan Sungai Kurau di Pulau Bangka, sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.



Gambar 2.6. Peta Barometri

2.7. Penggunaan Lahan

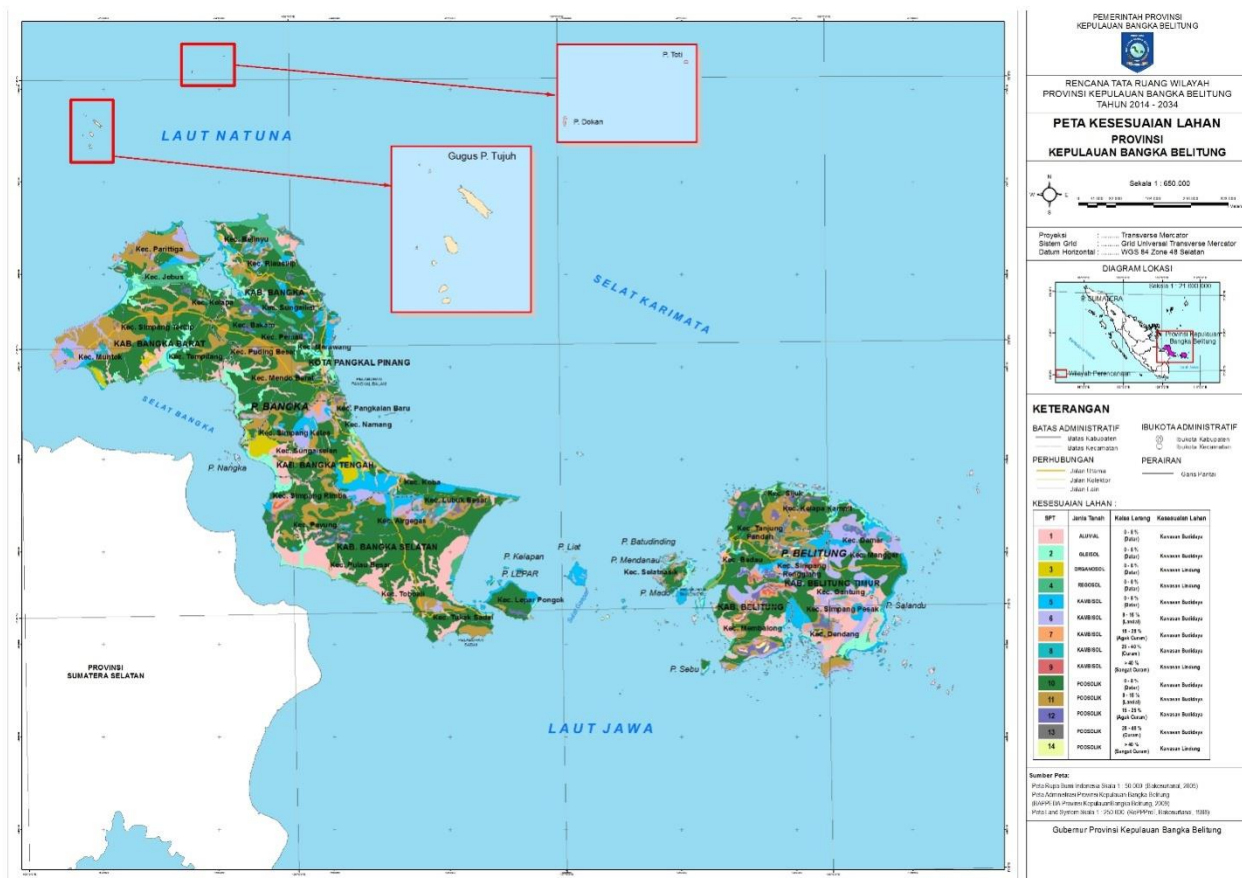
Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari Bangka Belitung Dalam Angka 2017, terlihat juga bahwa lahan bukan pertanian jalan, permukiman, perkantoran, sungai dll 455.762 Ha (27,7%) lebih lanjut dapat diperhatikan Tabel 2.7. Dari seluruh luas lahan 70% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

Tabel 2.7. Jenis dan Luas Penggunaan Lahan

Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung								
Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)							
	Bangka	Belitung	Bangka Barat	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Belitung Timur	Pangkal Pinang	Jumlah
I. Lahan Pertanian	233 977	195 776	218 878	164 227	231 828	139 850		1.186.652
I.1.Lahan Sawah	3 340	1 009	2 518	108	13 289	2 507		22.771
a. Irigasi	1 586	930	-	53	1 557	476		4.602
b.Tadah Hujan	1 484	79	2 518	53	10 230	2 031		16.387
c.Rawa pasang surut	270	-	-	-	-	-		270
d.Rawa lebak	-	-	-	-	1 502	-		1.502
I.2.Lahan Bukan Sawah	230 637	194 767	216 360	164 119	218 539	137 343	2.203	1.163.881
a.Tegal	49 787	10 950	6 470	16 509	18 501	14 280	879	117.376
b.Ladang	11 668	9 175	2 528	834	3 340	558	43	28.147
c.Perkebunan	88 185	61 608	60 977	21 287	71 709	63 651	521	367.848
d.Hutan Rakyat	14 742	12 975	1 795	-	1 448	11 668	8	42.637
e.Padang Penggembalaan	3	417	46	-	557	1 238	2	2.263
f.sementara tidak diusahakan	37 250	2 562	13 464	-	6 185	7 655	298	67.415
g.Lain-lain(Tambak, kolam, empang,hutan negara, dll)	29 002	97 080	131 080	125 489	116 799	38 293	452	538.195
II.Lahan Bukan Pertanian								
a.Jalan, Permukiman, Perkantoran,Sungai,dll	61 091	33 592	63 183	48 450	128 878	110 931	9.637	455.762
Jumlah	295 068	229 369	282 061	212 677	360 707	250 691	11.840	1.642.414

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2017

Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan oleh permukiman sebesar 455.762 Ha kemudian kedua digunakan sebagai perkebunan sebesar 367.848 Ha dan luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada penggembalaan sebesar 2.263 Ha.



Gambar 2.7. Peta Kesesuaian Lahan

2.8. Wilayah rawan bencana

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Ancaman bencana alam tersebut antara lain adalah banjir dan cuaca ekstrem (puting beliung). Di samping itu bencana non alam seperti gagal teknologi (kecelakaan transportasi) juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8.1. Rekapitulasi Kejadian Bencana 2016

No	Jenis Bencana	Jumlah Titik Lokasi Kejadian (%)		Jumlah Korban		Kondisi Korban			Kondisi Rumah/Bangunan			Sarana Kesehatan	Sarana Peribadatan/Sosial	Sarana Pendidikan	Sarana Pemerintah	Ket
				KK	Jiwa	Tewas/Hilang	Luka Berat	Luka Ringan/Mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Angin Puting Beliung/Angin Kencang	11	5,21%	111				1	7	8	95		1			
2	Banjir Bandang/Rob/Bah	143	67,77%	19.019	22	3		52.097		2	9.984				1	
3	Di Laut/Pantai	6	2,84%		18	7	1	2								
4	Di Sungai		0,00%													
5	Longsor Tanah/Batu/Pasir	8	3,79%		20	10		3								
6	Kebakaran Hutan/Lahan	1	0,47%		0											
7	Kebakaran Rumah/Perumahan	11	5,21%	8	13				9	2	2					
8	Kebakaran Gedung Pemerintahan		0,00%													
9	Kebakaran Pasar/Ruko, Gedung, Gudang, Kantor/Sekolah Swasta, Warung/Toko dan Lainnya	7	3,32%		10	1			4		2					
10	Kabut Asap		0,00%													
11	Gempa Bumi (3 Kec.)	15	7,11%													
12	Bencana Sosial	2	0,95%		2		1	1								
13	Tersambar Petir	7	3,32%		24	2	3	9	1		4				1	
TOTAL		211		19.138	109	23	5	52.113	21	12	10.087	0	1	0	2	

Sumber: Data dan Informasi Bencana Bangka Belitung 2016

Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bencana banjir telah terjadi pada tahun 2016 dengan korban sebanyak 52.100 korban.
2. Bencana yang paling sering terjadi yaitu banjir sebanyak 143 titik (67,7%).

Gambar 2.8

Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 2.8. Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2014

2.9. Budaya bermukim masyarakat

Penduduk Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang semula dihuni orang-orang suku laut, dalam perjalanan sejarah yang panjang membentuk proses kulturisasi dan akulturasi. Orang-orang laut itu sendiri berasal dari berbagai pulau. Orang laut dari Belitung berlayar dan menghuni pantai-pantai di Malaka. Sementara mereka yang sudah berasimilasi menyebar ke seluruh Tanah Semenanjung dan pulau-pulau di Riau. Kemudian kembali dan menempati lagi Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan mereka yang tinggal di Riau Kepulauan berlayar ke Bangka. Datang juga kelompok-kelompok Orang Laut dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Pada gelombang berikutnya, ketika mulai dikenal adanya Suku Bugis, mereka datang dan menetap di Bangka, Belitung dan Riau. Lalu datang pula orang dari Johor, Siantan yang Melayu, campuran Melayu-Cina, dan juga asli Cina, berbaur dalam

proses akulturasi dan kulturisasi. Kemudian datang pula orang-orang Minangkabau, Jawa, Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu melebur. Lalu jadilah suatu generasi baru: Orang Melayu Bangka Belitung.

Bahasa yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Bahasa Melayu yang juga disebut sebagai bahasa daerah, namun seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa.

2.9.1. Desain Bentuk Rumah Adat Bangka Belitung.

1. **Rumah Panggung** adalah rumah melayu awal yang masih terbuat dari material alam, seperti kayu, bambu, rotan, akar pohon, daun-daun atau alang-alang yang ada serta tumbuh di sekitar area pemukiman penduduk. Desain Bentuk Rumah Panggung ini berdasarkan pada filosofi 9 tiang, karenanya setiap rumah adat ini memiliki 9 tiang. Rumah Adat Bangka Belitung terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang utama, loss dan dapur.

2. **Rumah Limas** adalah merupakan hasil adopsi dari rumah tradisional asal Sumatra Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dahulunya berasal dari Sumatera Selatan sehingga Bangka Belitung memiliki rumah adat Limas juga. Ciri khas dari rumah adat Limas ini adalah atapnya yang berbentuk limas, rumah tradisional ini memiliki ketinggian lantai yang berbeda yang disebut Bengkilas. Perbedaan tinggi lantai ini menandakan derajat dari tamu yang memasuki ruangan tersebut. Lantai tertinggi dipergunakan untuk kepentingan keluarga seperti hajatan. Sedangkan para tamu biasanya diterima hanya diteras atau di lantai kedua.

3. **Rumah Rakit** seperti juga namanya, yaitu rakit yang berbentuk rumah. Rumah rakit ini dibangun diatas air sebagai tempat tinggal dan tempat bisnis ekonomi. Bahan utama dari rumah rakit adalah bambu. Jenis bambu yang digunakan adalah Bambu manyan, karena bambu ini sangat baik digunakan sebagai pelampung rumah rakit. Keunggulan dari bambu jenis ini yaitu, selain tahan lama juga memiliki bentuk yang besar-besar sehingga menjadi pilihan utama dalam pembuatan rumah rakit. Selain bambu, adapula yang menggunakan balok kayu sebagai pelampung rumah rakit.

2.9.2. Suku Adat Bangka Belitung

1. Suku Jering

Suku Jering merupakan suku terbesar di Babel karena daerahnya meliputi hampir tiga kecamatan, namun saat ini kehidupan masyarakatnya banyak yang beralih ke kehidupan modern. Kehidupan warga sebagian besar merupakan pekebun, seperti menyadap karet, memetik lada, merawat kebun, menunggu durian jatuh. Kebanyakan Suku Jering ini berada di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat

2. Suku belitung

Suku Belitung atau kadang disebut sebagai suku Melayu-Belitung adalah komunitas masyarakat yang bermukim di pulau Belitung dan daerah sekitarnya.

Suku Belitung diperkirakan berasal dari daratan Malaka (Melayu), yang datang ke pulau Belitung pada abad ke-18. Sebelum kedatangan bangsa Melayu, pulau Belitung dahulunya dianggap kosong tidak berpenghuni. Tetapi, sejumlah teori menyebutkan bahwa sebelum hadirnya masyarakat Melayu di pulau Belitung, terdapat "suku asli" yang mendiami pulau itu, yang disebut suku Ameng Sewang. Segera setelah kedatangan bangsa Melayu, tradisi dan budaya Melayu berkembang, dan menjadi budaya mayoritas di pulau Belitung. Orang Belitung sendiri menyebut diri mereka "urang Belitung".

Dalam segi mata pencaharian, orang Belitung banyak yang bertani, dengan tanaman utama, yakni karet, lada, cengkeh, dan kelapa. Dalam bertanam padi, orang Belitung mengenal konsep "huma" atau sawah kering, yang sebagian dilakukan dengan membuka lahan di hutan. Selain menghasilkan padi, mereka juga menanam tanaman jagung, umbi-umbian, dan pisang. Selain bertani, orang Belitung banyak yang bekerja di bidang pertambangan terutama timah dan kaolin. Sebagian dari mereka juga bekerja pada sektor lain dan ada juga yang telah mengembangkan industri kerajinan. Bahasa yang dipertuturkan oleh orang Belitung secara umum masih termasuk dalam rumpun bahasa Melayu tetapi memiliki perbedaan. Bahasa mereka terkadang disebut bahasa Melayu-Belitung. Bahasa Belitung ini dianggap sebagai salah satu dialek dari rumpun bahasa Melayu, yang juga memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu Riau dan bahasa Melayu Malaysia. Ciri khas dari bahasa ini adalah tidak terdapat huruf "h" misalnya pada kata "*jao*" (jauh), "*ujan*" (hujan), "*pute*" (putih). Ciri lainnya yaitu pada

penggunaan kosakata dari penggabungan dari dua kata atau lebih, contohnya "*nakmane*" (hendak kemana).

Dalam hal garis keturunan, orang Belitung mengenal prinsip "bilateral" menurut pada garis kedua orangtua. Kelompok keluarga luas orang Belitung pada terbentuk dalam bentuk *keleka* (kampung adat) yang memiliki aturan tersendiri. *Keleka* dipimpin seorang kepala adat.

Agama Islam masuk ke wilayah ini sekitar abad ke-17. Walaupun demikian, sistem "kepercayaan asli" masih hidup di beberapa kalangan masyarakat. Misalnya, pada upacara-upacara mengerjakan dan menggarap ladang (*maras taun*), dalam menangkap ikan (*buang jong*), menyelenggarakan upacara perkawinan (*gawai penganten*), dan sebagainya.

3. Suku Lom

Di Bangka Belitung terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai **suku Lom** atau **urang Lom**. Suku Lom ini disebut juga sebagai **urang Mapur** atau **suku Mapur**, karena tinggal di kampung Mapur. Wilayah pemukiman suku Lom ini berada di dusun Air Abik dan dusun Pejam, yang masih termasuk bagian wilayah desa Gunung Muda, kampung Mapur kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Masyarakat suku Lom saat ini mencapai 139 KK.

Asal-usul suku Lom merupakan misteri bagi masyarakat lain yang berada di wilayah tersebut. Berbagai spekulasi berkembang karena suku Lom tidak memiliki catatan tertulis apapun tentang akar sejarah mereka.

Satu-satunya yang bisa dijadikan pegangan tentang asal-usul suku Lom adalah berdasarkan cerita yang dituturkan secara lisan dari generasi ke generasi. Kelengkapan cerita lisan ini semakin lama semakin tidak lengkap, karena seiring meninggalnya tokoh-tokoh tua dan minimnya tokoh muda yang tertarik untuk menyerap cerita itu secara lengkap.

Menurut dugaan bahwa suku Lom ini adalah termasuk salah satu suku tertua di Sumatra (Proto Malayan) dan tertua di Bangka Belitung. Suku Lom telah lama hidup di wilayah Vietnam sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Karena di wilayah mereka dahulu sering terjadi konflik dan serbuan dari prajurit Han, maka mereka bermigrasi menyeberang laut, mendarat dan menetap di daerah Gunung Muda, Belinyu, sekitar abad ke-5 Masehi.

Menurut Olaf H Smedal, seorang peneliti dari Norwegia, dalam bukunya "*Preliminary Findings on a Non-Muslim Malay Group in Indonesia (1988)*", terdapat catatan *anonim* berangka tahun 1862 yang menceritakan dua cerita asal-usul Suku Lom.

Salah satu cerita menceritakan, sekitar abad ke-14 Masehi, sebuah kapal yang ditumpangi sekelompok orang dari daerah Vietnam terdampar dan rusak di pantai Tanjung Tuing kecamatan Belinyu. Semua penumpang tewas, hanya tiga orang yang selamat, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ketiga orang ini menetap dan membuat perkampungan di daerah Gunung Pelawan, Belinyu.

4. Suku Sawang

Suku Sawang, adalah suatu komunitas masyarakat adat yang mendiami wilayah kabupaten Belitung. Suku Sawang ini adalah penduduk asli pulau Kabupaten Belitung, yang tersebar di Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Masyarakat suku Sawang dahulunya hidup di laut, hidup di perahu beratap selama berbulan-bulan secara nomaden mencari sumber kehidupan di laut. Mereka membangun pemukiman di pesisir pantai, dan memiliki kebiasaan hidup seperti suku Laut yang berada di Kepulauan Riau. Menurut dugaan suku Sawang ini dahulunya berasal dari daerah Kepulauan Riau, dan masih berkerabat secara rumpun dengan suku Laut. Namun, mereka saat ini tidak lagi sebagai "orang laut", karena sebagian besar dari mereka telah terbiasa hidup di darat. Sebagian lain masih tetap mempertahankan tradisi hidup "melaut"

Dengan pola mobilitas geografis macam ini, sulit untuk melakukan cacah jiwa Suku Sawang. Data Staat van de Bevolking op Billiton keluaran tahun 1851. Dari 5564 penduduk Belitong, 3531 adalah orang suku sawang.

5. Kampung Tua Cina

Desa Gedong berlokasi di Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa ini begitu tenang, sepi, dan asri. Desa Gedong adalah perkampungan pecinaan kuno yang tertua di Bangka Belitung. Kampung Cina ini sudah ada sejak abad ke -18. Kabarnya dulu penghuni desa ini adalah warga keturunan China Daratan (Tionghoa Hakka) yang didatangkan dari

Bangka Belitung oleh Kolonial Belanda. Mereka sengaja didatangkan untuk menjadi penambang timah. Guangdong adalah daerah asal mereka, karena warga di sana dikenal sebagai penambang timah yang handal. Desa ini masih sangat tradisional, dengan bangunan tuanya yang belum di renovasi namun masih tetap bagus kondisinya hingga sekarang.

6. **Suku Bugis Bangka**

Keberadaan masyarakat Bugis di Bangka Belitung ada sekitar 130 ribu orang. Penyebaran masyarakat Bugis hampir di seluruh Bangka Belitung dan membentuk perkampungan. Husain Karim Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) saat ditemui Bangka Pos Group, Rabu (5/1) mengatakan ada sekitar 130 ribu orang turunan bugis di Pulau Bangka dan Belitung. Mereka hidup di daerah pesisir dan rata-rata bekerja sebagai nelayan tangkap. "Tersebar di Bangka Selatan, di Bangka Tengah misalnya di Kurau, di Muntok, di Sungailiat dan di Belitung. Kalau dari sensus jumlahnya saat ini sekitar 130 ribu dan termasuk di Desa Batu Belubang ini".

7. **Kampung Bali**

Bangka Belitung merupakan daerah yang penduduknya sangat heterogen. Heterogenitas ini selain karena sejarah migrasi akibat kolonialisasi serta posisinya yang terletak di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), Bangka Belitung juga menjadi salah satu destinasi program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Di Bangka Belitung selain ditemukan perkampungan Madura atau perkampungan Bugis, juga terdapat Kampung Bali yang didiami oleh masyarakat transmigran dari pulau Bali. Salah satu perkampungan Bali yang menjadi istimewa adalah kampung Bali di Kabupaten Belitung.

Kampung Bali atau Dusun Balitung, terletak di Desa Pelepak Putih, Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, sekitar 30 kilometer dari Kota Tanjung Pandan. Kampung ini berdiri sejak tahun 1990. Terdapat sekitar 130 kepala keluarga yang tinggal di kampung ini.

Sebagaimana di tempat asalnya, penduduk Kampung Bali menata perkampungannya seperti kampung mereka dahulu di Pulau Bali. Terdapat pura-pura kecil di sudut-sudut rumah penduduk, serta gapura-gapura khas Bali di kampung ini. Tradisi asli mereka juga tetap dipertahankan. Kampung ini akan meriah dengan hiasan penjor yang akan

dipasang disepanjang jalan ketika merayakan hari raya Hindu. Terdapat pula sebuah pura besar atau pure Puseh yang menjadi pusat peribadatan penduduk Kampung Bali. Kampong ini menjadi ramai ketika mereka merayakan upacara-upacara seperti Galungan, Kuningan, Saraswati, Melasti dan sebagainya.

Sebuah gapura khas Bali akan menyambut begitu memasuki Kampung Bali. Masuk lebih ke dalam, kita akan disajikan pemandangan pura-pura yang berdiri megah di pinggir jalan. Selain itu, rumah-rumah dengan sentuhan Bali juga bisa kita lihat di sini.

Kampung Bali sudah ada di Desa Sijuk sejak tahun 1991. Masyarakat Bali yang hidup di sini sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan membuka ladang kosong yang ada di sekitar kampung.

Ada sekitar 130 kepala keluarga yang menghuni kampung yang juga diberi nama Desa Balitung ini. Sehari-harinya, kampung ini juga dikunjungi wisatawan asing yang ingin merasakan suasana Bali di Pulau Belitung.

Letaknya yang tidak jauh dari kawasan pantai-pantai indah yang ada di Desa Sijuk membuat kampung ini menjadi salah satu destinasi unik di Pulau Belitung.

2.10. KONDISI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2.10.1. Sebaran Perumahan dan Permukiman

Tabel. 2.10.1.1. Backlog Kepemilikan dan Backlog penghunian

			Kepemilikan Rumah / Bangunan Tempat Tinggal						
No	Kab / Kota	Jml KK	Milik sendiri	Kontrak / sewa	Menumpang	Lainnya	Jml KK	Backlog kepemilikan	Backlog penghunian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)	(10)=(8)-((4)+(5)+(7))
1	Kab. Bangka	74.190	65.995	1.934	5.194	1.067	74.190	8.195	5.194
2	Kab. Belitung	37.744	32.729	851	3.657	507	37.744	5.015	3.657
3	Kab. Bangka Selatan	43.169	37.226	958	4.538	447	43.169	5.943	4.538
4	Kab. Bangka Tengah	41.509	35.760	1.483	3.881	385	41.509	5.749	3.881
5	Kab. Bangka Barat	42.142	36.596	859	4.329	358	42.142	5.546	4.329
6	Kab. Belitung Timur	33.864	27.100	691	4.913	1.160	33.864	6.764	4.913
7	Kota Pangkalpinang	45.820	35.755	4.150	5.242	673	45.820	10.065	5.242
Prov. Kep. Babel		318.438	271.161	10.926	31.754	4.597	318.438	47.277	31.754

Tabel. 2.10.1.2. Jumlah Rumah Tapak

Provinsi	Kab / Kota	No	Jenis Fisik Bangunan Rumah	Jumlah (unit)	Sumber Data
		(1)	(2)	(3)	(4)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	1	Rumah Tapak	69.927	DINPERKPP (Januari 2017)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	2	Rumah Tapak	42.142	BKKBN
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	3	Rumah Tapak	47.789	Dinsosnakertrans & Dinperkimhub
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	4	Rumah Tapak	47.828	BKKBN
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	5	Rumah Tapak	37.744	BKKBN
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	6	Rumah Tapak	33.864	BKKBN
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	7	Rumah Tapak	37.363	KOTAKU
Total				316.657	

Tabel. 2.10.1.3. Jumlah Rumah Susun

Provinsi	Kab / Kota	No	Jenis Fisik Bangunan Rumah	Jumlah (lokasi)	Keterangan
		(1)	(2)	(3)	(4)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	1	Rumah Susun / Apartemen	3	STAIN, Belinyu, Kace Ponpes DA
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	2	Rumah Susun / Apartemen	1	Sungai daeng
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	3	Rumah Susun / Apartemen	3	Tanjung Gunung 2, Jln Sungai Selan 1
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	4	Rumah Susun / Apartemen	1	(1) Toboali, Polri
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	5	Rumah Susun / Apartemen	Tidak ada	
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	6	Rumah Susun / Apartemen	Tidak ada	
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	7	Rumah Susun / Apartemen	1	2 TwinBlock (4 Unit/Massa) 1 lokasi
Total				9	

2.10.2. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Dalam Satu Rumah

Tabel. 2.10.2.1 Jumlah Rumah dengan 1 KK

Provinsi	Kab / Kota	No	Fungsi Rumah	Jumlah (unit)	Sumber Data
		(1)	(2)	(3)	(4)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	1	Rumah dengan 1 (satu) KK	44.753	DINPERKPP
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	2	Rumah dengan 1 (satu) KK	5.679	BDT 2015
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	3	Rumah dengan 1 (satu) KK	43.136	Dinsosnakertrans, Dinperkimhub & DinDukcapil
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	4	Rumah dengan 1 (satu) KK	47.828	BPS 2016
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	5	Rumah dengan 1 (satu) KK	40.601	ILPPD 2015
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	6	Rumah dengan 1 (satu) KK	21.597	Data Desa
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	7	Rumah dengan 1 (satu) KK	34.587	KOTAKU
				238.181	

Tabel. 2.10.2.2. Jumlah Rumah dengan lebih dari 1 KK

Provinsi	Kab / Kota	No	Fungsi Rumah	Jumlah (unit)	Sumber Data
		(1)	(2)	(3)	(4)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	1	Rumah dengan lebih dari 1 (satu) KK	25.174	DINPERKPP
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	2	Rumah dengan lebih dari 1 (satu) KK	520	BDT 2015
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	3	Rumah dengan lebih dari 1 (satu) KK	4.653	Dinsosnakertrans, Dinperkimhub & DinDukcapil
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	4	Rumah dengan lebih dari 1 (satu) KK	4.538	BDT 2016
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	5	Rumah dengan lebih dari 1 (satu) KK	3.864	ILPPD 2015
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	6	Rumah dengan lebih dari 1 (satu) KK	6.460	Data Desa
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	7	Rumah dengan lebih dari 1 (satu) KK	2.776	KOTAKU
				47.985	

2.10.3. Jumlah Sambungan Listrik Rumah (PLN)

Tabel. 2.10.3. Jumlah Sambungan Listrik Rumah

Provinsi	Kab / Kota	No	Jml Kecamatan	Jumlah (unit)		Sumber Data
				2016	2017	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	1	8	59.673	81.700	Data resmi PLN pelanggan tarif rumah tangga (hingga 23 Mei 2017)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	2	6	Tidak ada data	48.352	
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	3	6	Tidak ada data	43.784	
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	4	8	44.820	45.525	
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	5	5	73.667	48.565	
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	6	7	24.843	30.272	
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	7	7	36.428	70.595	
Total			47	239.431	368.793	

2.10.4. Jumlah Pembangunan Rumah dalam Satu Tahun

Tabel 2.10.4. Pembangunan Rumah dalam Satu Tahun

Provinsi	Kab / Kota	No	Jumlah Pembangunan Rumah		Jumlah Pembangunan Rumah		Jumlah Pembangunan Rumah		Sumber Data
			Berdasarkan IMB 2016 (unit)		Berdasarkan IMB 2017 (unit)		Berdasarkan Non IMB (unit)		
			Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)	(7)=(3)+(5)	(8)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	1	92	252					Dinas PMP2KUKM
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	2	145		94		239		KPMPP
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	3	31	547					Dinas PMPTSPTK
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	4	11		10				Dinas DMPPTSPRINDAG
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	5	63		6		69		
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	6		206		80			
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	7	4.134	591			30.645	6.675	KOTAKU
Total			4.476	1.596	110	80	30.953	6.675	

2.10.5. Rumah Tidak Layak Huni

Tabel 2.10.5. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Provinsi	Kab / Kota	No	Jml Kecamatan	Jumlah KK / RTg	Jumlah RTLH	Jumlah RTLH Verifikasi Pemda (unit)	Sumber Data
					Versi BDT (unit)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	1	8	90.908	607	2.322	Form 1B Kab. Bangka
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	2	6	37.744	697	901	Form 1B Kab. Bangka Barat
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	3	6	43.169	368	1.466	Form 1B Kab. Bangka Tengah
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	4	8	54.308	503	503	Form 1B Kab. Bangka Selatan
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	5	5	42.142	690	2.975	Form 1B Kab. Belitung
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	6	7	33.864	394	2.797	Form 1B Kab. Belitung Timur
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	7	7	40.580	41	784	Form 1B Kota Pangkalpinang
Total			47	342.715	3.300	11.748	

2.10.5.1. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka

Tabel 2.10.5.1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka

Provinsi	Kab / Kota	No	Kecamatan	Jumlah KK / RTg	Jumlah RTLH	Jumlah RTLH Verifikasi Pemda (unit)	Sumber Data
					Versi BDT (unit)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	1	SUNGAILIAT	27.307	71	694	Survey Dinas PUPR
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	2	PEMALI	9.656	9	88	Survey Dinas PUPR
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	3	PUDING BESAR	5.506	40	58	Survey Dinas PUPR
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	4	BAKAM	5.106	62	137	Survey Dinas PUPR
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	5	MENDO BARAT	12.565	84	839	Survey Dinas PUPR
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	6	RIAU SILIP	7.920	123	342	Survey Dinas PUPR
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	7	BELINYU	14.624	181	315	Survey Dinas PUPR
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	8	MERAWANG	8.314	37	191	Survey Dinas PUPR
Total				90.908	607	2.322	

2.10.5.2. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka Barat

Tabel 2.10.5.2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka Barat

Provinsi	Kab / Kota	No	Kecamatan	Jumlah KK / RTg	Jumlah RTLH	Jumlah RTLH Verifikasi Pemda (unit)	Sumber Data
					Versi BDT (unit)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	1	Muntok	235	87	98	DINSOS PEMDES
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	2	Simpang Teritip	213	326	197	DINSOS PEMDES
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	3	Parittiga	108	46	92	DINSOS PEMDES
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	4	Jebus	145	50	129	DINSOS PEMDES
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	5	Kelapa	221	122	204	DINSOS PEMDES
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	6	Tempilang	198	66	181	DINSOS PEMDES
Total				1.120	697	901	

2.10.5.3. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka Tengah

Tabel 2.10.5.3. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka Tengah

Provinsi	Kab / Kota	No	Kecamatan	Jumlah KK / RTg	Jumlah RTLH	Jumlah RTLH Verifikasi Pemda (unit)	Sumber Data
					Versi BDT (unit)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	1	Koba	244	35	227	BDT Kab. Bangka Tengah
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	2	Lubuk Besar	399	110	374	BDT Kab. Bangka Tengah
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	3	Namang	209	28	195	BDT Kab. Bangka Tengah
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	4	Pangkalanbaru	256	54	237	BDT Kab. Bangka Tengah
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	5	Simpang Katis	145	29	139	BDT Kab. Bangka Tengah
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	6	Sungaiselan	309	112	294	BDT Kab. Bangka Tengah
Total				1.562	368	1.466	

2.10.5.4. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka Selatan

Tabel 2.10.5.4. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka Selatan

Provinsi	Kab / Kota	No	Kecamatan	Jumlah KK / RTg	Jumlah RTLH	Jumlah RTLH Verifikasi Pemda (unit)	Sumber Data
					Versi BDT (unit)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	1	Payung	6.008	50	50	BDT 2015 TNP2K
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	2	Pulau Besar	2.711	42	42	BDT 2015 TNP2K
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	3	Simpang Rimba	6.084	79	79	BDT 2015 TNP2K
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	4	Toboali	21.506	112	112	BDT 2015 TNP2K
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	5	Tukak Sadai	3.261	46	46	BDT 2015 TNP2K
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	6	Air Gegas	11.249	87	87	BDT 2015 TNP2K
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	7	Lepar Pongok	2.215	20	20	BDT 2015 TNP2K
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	8	Kepulauan Pongok	1.274	67	67	BDT 2015 TNP2K
Total				54.308	503	503	

2.10.5.5. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Belitung

Tabel 2.10.5.5. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Belitung

Provinsi	Kab / Kota	No	Kecamatan	Jumlah KK / RTg	Jumlah RTLH	Jumlah RTLH Verifikasi Pemda (unit)	Sumber Data
					Versi BDT (unit)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	1	Membalong	1.553	273	558	BDT 2015 TNP2K
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	2	Tanjungpandan	8.790	93	1098	BDT 2015 TNP2K
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	3	Badau	893	111	296	BDT 2015 TNP2K
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	4	Sijuk	1.962	137	829	BDT 2015 TNP2K
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	5	Selat Nasik	483	41	194	BDT 2015 TNP2K
Total				13.681	690	2.975	

2.10.5.6. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Belitung Timur

Tabel 2.10.5.6. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Belitung Timur

Provinsi	Kab / Kota	No	Kecamatan	Jumlah KK / RTg	Jumlah RTLH	Jumlah RTLH Verifikasi Pemda (unit)	Sumber Data
					Versi BDT (unit)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	1	Manggar		51	935	Data Backlog Perumahan (Permintaan Data Ke Desa)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	2	Damar		46	336	
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	3	Renggiang		40	244	
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	4	Dendang		44	233	
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	5	Gantung		81	463	
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	6	Simpang Pesak		84	126	
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	7	Kelapa Kampit		48	460	
Total					394	2.797	

2.10.5.7. Rumah Tidak Layak Huni Kota Pangkalpinang

Tabel 2.10.5.7. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Pangkalpinang

Provinsi	Kab / Kota	No	Kecamatan	Jumlah KK / RTg	Jumlah RTLH	Jumlah RTLH Verifikasi Pemda (unit)	Sumber Data
					Versi BDT (unit)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	1	BUKIT INTAN	7.775	13	84	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	2	GIRIMAYA	4.023	3	60	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	3	PANGKAL BALAM	4.696	4	86	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	4	RANGKUI	7.841	4	254	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	5	TAMAN SARI	3.938	2	136	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	6	GABEK	5.561	3	89	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	7	GERUNGGANG	6.746	12	75	KOTAKU
Total				40.580	41	784	

2.10.6. Sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Tabel 2.10.6. Luas Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni dalam wilayah kumuh

Provinsi	Kab / Kota	No	Jml Kecamatan	Jml Kel / Desa	Luas wilayah kumuh (Ha)	Jumlah RTLH dalam wilayah kumuh (unit)	Sumber Data
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	1	2	5	81,63	135	Form 1B Kab. Bangka
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	2	4	7	85,32	565	Form 1B Kab. Bangka Barat
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	3	4	4	55,92	Tidak ada data	Form 1B Kab. Bangka Tengah
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	4	4	5	40,89	38	Form 1B Kab. Bangka Selatan
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	5	1	6	103,17	2.186	Form 1B Kab. Belitung
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	6	2	3	124,56	501	Form 1B Kab. Belitung Timur
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	7	5	14	196,19	391	Form 1B Kota Pangkalpinang
			22	44	687,68	3.816	

2.10.6.1. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Pangkalpinang

Tabel 2.10.6.1. Luas Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni dalam wilayah kumuh Kota Pangkalpinang

Provinsi	Kab / Kota	No	Kecamatan	Kel / Desa	Luas wilayah kumuh (Ha)	Jumlah RTLH dalam wilayah kumuh (unit)	Sumber Data
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	1	BUKIT INTAN	PASIR PUTIH	22,60	48	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	2	BUKIT INTAN	SEMABUNG LAMA	15,60	15	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	3	GIRIMAYA	BATU INTAN	8,30	0	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	4	GIRIMAYA	PASAR PADI	2,40	8	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	5	GIRIMAYA	SEMABUNG BARU	7,90	20	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	6	PANGKAL BALAM	KETAPANG	16,20	39	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	7	PANGKAL BALAM	LONTONG PANCUR	5,30	12	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	8	RANGKUI	BINTANG	6,00	10	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	9	RANGKUI	PARIT LALANG	44,80	64	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	10	TAMAN SARI	BATIN TIKAL	1,89	2	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	11	TAMAN SARI	GEDUNG NASIONAL	6,60	29	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	12	TAMAN SARI	KEJAKSAAN	24,60	44	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	13	TAMAN SARI	OPAS INDAH	17,70	79	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	14	TAMAN SARI	RAWA BANGUN	16,30	21	KOTAKU
Total					196,19	391	

2.10.6.2. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bangka Tengah

Tabel 2.10.6.2. Luas Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni dalam wilayah kumuh Kabupaten Bangka Tengah

Provinsi	Kab / Kota	No	Kecamatan	Kel / Desa	Luas wilayah kumuh (Ha)	Jumlah RTLH dalam wilayah kumuh (unit)	Sumber Data
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	1	Pangkalan Baru	Batu Belubang	6,60		Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/4183/DPU/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kab. Bangka Tengah
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	2	Koba	Kurau	20,10		
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	3	Sungaiselan	Sungaiselan	14,44		
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	4	Koba	Padang Mulya	14,78		
Total					55,92		

2.10.6.3. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bangka

Tabel 2.10.6.3. Luas Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni dalam wilayah kumuh Kabupaten Bangka

Provinsi	Kab / Kota	No	Kecamatan	Kel / Desa	Luas wilayah kumuh (Ha)	Jumlah RTLH dalam wilayah kumuh (unit)	Sumber Data
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	1	Sungailiat	Sungailiat	50,02	71	KOTAKU dan DINPERKPP
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	2	Sungailiat	Kuday	11,68	15	KOTAKU
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	3	Belinyu	Air Jukung	8,96	1	KOTAKU dan DINPERKPP
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	4	Belinyu	Mantung	10,97	16	KOTAKU dan DINPERKPP
Total					81,63	135	

2.10.6.4. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bangka Barat

Tabel 2.10.6.4. Luas Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni dalam wilayah kumuh Kabupaten Bangka Barat

Provinsi	Kab / Kota	No	Kecamatan	Kel / Desa	Luas wilayah kumuh (Ha)	Jumlah RTLH dalam wilayah kumuh (unit)	Sumber Data
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	1	Muntok	Tanjung	10	114	Sesuai hasil verifikasi RP2KPKP tahun 2016
				Teluk Rubiah	7,64		
		2	Parittiga	Puput	32,06	108	
		3	Jebus	Sinar Manik	6,78	145	
		4	Tempilang	Benteng Kota	18,84	198	
				Air Lintang	10		
Total					85,17	565	

2.10.6.5. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bangka Selatan

Tabel 2.10.6.5. Luas Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni dalam wilayah kumuh Kabupaten Bangka Selatan

Provinsi	Kab / Kota	No	Kecamatan	Kel / Desa	Luas wilayah kumuh (Ha)	Jumlah RTLH dalam wilayah kumuh (unit)	Sumber Data
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	1	Toboali	Tanjung Ketapang	4,50	6	Sk Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/252/BP3MD/2014 Tanggal 16 September 2014 tentang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Selatan
				Sukadamai	12,93	7	
		2	Tukak Sadai	Sadai	2,41	7	
		3	Simpang Rimba	Permis	14,08	10	
		4	Pulau Besar	Batu Betumpang	6,97	8	
Total					40,89	38	

2.10.6.6. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Belitung

Tabel 2.10.6.6. Luas Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni dalam wilayah kumuh Kabupaten Belitung

Provinsi	Kab / Kota	No	Kecamatan	Kel / Desa	Luas wilayah kumuh (Ha)	Jumlah RTLH dalam wilayah kumuh (unit)	Sumber Data
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	1	Tanjungpandan	Kota	5,73	100	BDT & KOTAKU
		2	Tanjungpandan	Tanjungpendam	6,92	102	
		3	Tanjungpandan	Kampung Parit	17,48	66	
		4	Tanjungpandan	Air Saga	56,13	1.635	
		5	Tanjungpandan	Paal Satu	6,73	224	
		6	Tanjungpandan	Kampung Damai	10,18	59	
Total					103,17	2.186	

2.10.6.7. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Belitung Timur

Tabel 2.10.6.1. Luas Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni dalam wilayah kumuh Kabupaten Belitung Timur

Provinsi	Kab / Kota	No	Kecamatan	Kel / Desa	Luas wilayah kumuh (Ha)	Jumlah RTLH dalam wilayah kumuh (unit)	Sumber Data
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	1	Manggar	Baru	37,95		SK No 188.45-609 tahun 2014
		2	Gantung	Selingsing	83,46		
		3	Gantung	Lenggiang	3,15		
Total					124,56	0	

2.11. Data kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum

2.11.1. Data kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum lokasi KOTAKU

DATA UMUM KAWASAN

Jml RT	:	1258			
Jml Kelurahan	:	104			
Jml Kecamatan	:	14	Jumlah Bangunan	:	110.728 Unit
Kab/Kota	:	0	Jumlah Penduduk	:	403.998 jiwa
Propinsi	:	KEP. BANGKA BELITUNG	Jumlah KK	:	110.658 KK

DATA NUMERIK PARAMETER KECUMUHAN

1	ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG		Numerik	
a.	Ketidakteraturan bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur	33.095	Unit
b.	Tingkat Kepadatan Bangunan	Luas kawasan dg kepadatan 200/250 unit/ha <	0,00	Ha
c.	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tdk sesuai teknis	5.616	Unit
2	ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN			
a.	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Panjang jalan ideal	2.588.395,19	m'
		Panjang jalan eksisting	1.963.153,39	m'
b.	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Panjang jalan dengan permukaan rusak	135.078,40	m'
3	ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM			
a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas	67.440	KK
b.	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup	65.078	KK

4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			
a.	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Luas kawasan yang terkena genangan	400,63 Ha
		Panjang drainase ideal	3.290.986,09 m'
b.	Ketidakterediaan Drainase	Panjang saluran drainase eksisting	1.637.464,98 m'
c.	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran tidak terakses ke sistem kota	169.506,70 m'
d.	Tidak perliharanya Drainase	Panjang saluran drainase tidak terpelihara	260.864,28 m'
e.	Kualitas Konstruksi Drainase	Panjang saluran drainase rusak	243.503,55 m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH			
a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar	45.677 KK
b.	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis	46.810 KK
6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
a.	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai standar teknis	93.489 KK
b.	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	86.616 KK
c.	Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah tdk terpelihara	83.801 KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN			
a.	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran 	<div>89.391</div> <div>Unit</div>
b.	Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran 	<div>105.081</div> <div>Unit</div>

2.11.2. Data kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum Lokasi Kumuh Kotaku

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan	:	5			
Kelurahan/Desa	:	24	Luas Verifikasi	:	431,74 Ha
Kecamatan	:	9	Jumlah Bangunan	:	10.174 Unit
Kab/Kota	:	KEP. BANGKA BELITUNG	Jumlah Penduduk	:	38.730 jiwa
Propinsi	:	KEP. BANGKA BELITUNG	Jumlah KK	:	10.174 KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG			Numerik	
a.	Ketidakteraturan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah bangunan tidak teratur 	4.892	Unit
b.	Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan dg kepadatan 200/250 unit/ha < 	0,00	Ha
c.	Ketidakesesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah bangunan tdk sesuai teknis 	983	Unit
2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN				
a.	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Panjang jalan ideal	114.803,85	m'
		Panjang jalan eksisting	89.807,82	m'
b.	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Panjang jalan dengan permukaan rusak 	14.992,00	m'

3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM				
a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas 	8.734	KK
b.	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup 	9.003	KK
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN				
a.	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	<ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan yang terkena genangan Panjang drainase ideal 	117,35	Ha
b.	Ketidakterediaan Drainase	<ul style="list-style-type: none"> Panjang saluran drainase eksisting 	121.422,35	m'
c.	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Panjang saluran tidak terakses ke sistem kota 	67.390,29	m'
d.	Tidak perliharanya Drainase	<ul style="list-style-type: none"> Panjang saluran drainase tidak terpelihara 	9.716,04	m'
e.	Kualitas Konstruksi Drainase	<ul style="list-style-type: none"> Panjang saluran drainase rusak 	31.649,34	m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH				
a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar 	8.638,67	m'
b.	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis 	9.747	KK
6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
a.	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai standar teknis 	9.787	KK
			9.196	KK

b.	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	9.170	KK
c.	Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah tdk terpelihara	8.927	KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN

a.	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	8.656	Unit
b.	Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	9.504	Unit

2.11.3. Data kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum Lokasi Kumuh Kabupaten Bangka

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan	:	3	Luas SK	:	75,00	Ha
Kelurahan/Desa	:	2	Luas Verifikasi	:	75,00	Ha
Kecamatan	:	1	Jumlah Bangunan	:	1.493	Unit
Kab/Kota	:	KAB. BANGKA	Jumlah Penduduk	:	6.035	jiwa
Propinsi	:	KEP. BANGKA BELITUNG	Jumlah KK	:	1.493	KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

1	ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG		Numerik	
a.	Ketidakteraturan bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur	955	Unit
b.	Tingkat Kepadatan Bangunan	Luas kawasan dg kepadatan 200/250 unit/ha <	0,00	Ha
c.	Ketidakesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tdk sesuai teknis	72	Unit

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN				
a.	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	▪ Panjang jalan ideal	10.901,60	m'
		▪ Panjang jalan eksisting	8.443,90	m'
b.	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	▪ Panjang jalan dengan permukaan rusak	3.246,00	m'
3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM				
a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	▪ Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas	1.471	KK
b.	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	▪ Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup	1.470	KK
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN				
a.	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	▪ Luas kawasan yang terkena genangan	0,00	Ha
		▪ Panjang drainase ideal	10.694,13	m'
b.	Ketidakterediaan Drainase	▪ Panjang saluran drainase eksisting	3.734,60	m'
c.	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	▪ Panjang saluran tidak terakses ke sistem kota	3.266,90	m'
d.	Tidak perliharanya Drainase	▪ Panjang saluran drainase tidak terpelihara	2.495,80	m'
e.	Kualitas Konstruksi Drainase	▪ Panjang saluran drainase rusak	1.119,30	m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH				
a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	▪ Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar	1.473	KK
b.	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak	▪ Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis	1.473	KK

Sesuai dengan Persyaratan Teknis

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai standar teknis	868	KK
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	912	KK
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah tdk terpelihara	988	KK
7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	1.062	Unit
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	1.260	Unit

2.11.4. Data kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum Lokasi Kumuh Kabupaten Bangka Barat

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan	:	2	Luas SK	:	17,49	Ha
Kelurahan/Desa	:	1	Luas Verifikasi	:	17,49	Ha
Kecamatan	:	1	Jumlah Bangunan	:	897	Unit
Kab/Kota	:	KAB. BANGKA BARAT	Jumlah Penduduk	:	3.101	jiwa
Propinsi	:	KEP. BANGKA BELITUNG	Jumlah KK	:	897	KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG			Numerik	
a.	Ketidakteraturan bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur	421	Unit
b.	Tingkat Kepadatan Bangunan	Luas kawasan dg kepadatan 200/250 unit/ha <	0,00	Ha
c.	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tdk sesuai teknis	13	Unit
2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN				
a.	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Panjang jalan ideal	12.949,40	m'
		Panjang jalan eksisting	11.528,80	m'
b.	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Panjang jalan dengan permukaan rusak	2.818,90	m'
3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM				
a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas	684	KK
b.	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup	732	KK
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN				
a.	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Luas kawasan yang terkena genangan	0,31	Ha
		Panjang drainase ideal	12.444,00	m'
b.	Ketidakterediaan Drainase	Panjang saluran drainase eksisting	6.892,00	m'
c.	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran tidak terakses ke sistem kota	0,00	m'

d.	Tidak perliharanya Drainase	▪ Panjang saluran drainase tidak terpelihara	1.275,00 m'
e.	Kualitas Konstruksi Drainase	▪ Panjang saluran drainase rusak	0,00 m'
5	ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH		
a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	▪ Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar	897 KK
b.	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis	897 KK
6	ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
a.	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai standar teknis	875 KK
b.	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	▪ Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	875 KK
c.	Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	▪ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah tdk terpelihara	875 KK
7	ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN		
a.	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	▪ Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	862 Unit
b.	Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	▪ Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	860 Unit

2.11.5. Data kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum Lokasi Kumuh Kabupaten Belitung

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan	:	6	Luas SK	:		Ha
Kelurahan/Desa	:	6	Luas Verifikasi	:	105,11	Ha
Kecamatan	:	TANJUNGPANDAN	Jumlah Bangunan	:	1.842	Unit
Kab/Kota	:	KAB. BELITUNG	Jumlah Penduduk	:	6.891	jiwa
Propinsi	:	KEP. BANGKA BELITUNG	Jumlah KK	:	1.842	KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

1	ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG		Numerik	
a.	Ketidakteraturan bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur	736	Unit
b.	Tingkat Kepadatan Bangunan	Luas kawasan dg kepadatan 200/250 unit/ha <	0,00	Ha
c.	Ketidakesesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tdk sesuai teknis	31	Unit
2	ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN			
a.	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Panjang jalan ideal	27.360,40	m'
		Panjang jalan eksisting	16.067,90	m'
b.	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Panjang jalan dengan permukaan rusak	2.544,10	m'
3	ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM			
a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas	1.354	KK
b.	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup	1.700	KK
4	ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			

a.	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	▪ Luas kawasan yang terkena genangan	11,02	Ha
		▪ Panjang drainase ideal	22.054,60	m'
b.	Ketidakterediaan Drainase	▪ Panjang saluran drainase eksisting	14.316,40	m'
c.	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	▪ Panjang saluran tidak terakses ke sistem kota	3.612,50	m'
d.	Tidak perliharanya Drainase	▪ Panjang saluran drainase tidak terpelihara	5.259,00	m'
e.	Kualitas Konstruksi Drainase	▪ Panjang saluran drainase rusak	2.856,30	m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH				
a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	▪ Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar	1.842	KK
b.	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis	1.842	KK
6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
a.	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai standar teknis	1.802	KK
b.	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	▪ Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	1.732	KK
c.	Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	▪ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah tdk terpelihara	1.694	KK
7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN				

a.	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran 	1.602	Unit
b.	Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran 	1.659	Unit

2.11.6. Data kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum Lokasi Kumuh Kabupaten Belitung Timur

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan	:	0	Luas SK	:	37,95	Ha
Kelurahan/Desa	:	1	Luas Verifikasi	:	37,95	Ha
Kecamatan	:	1	Jumlah Bangunan	:	891	Unit
Kab/Kota	:	KAB. BELITUNG TIMUR	Jumlah Penduduk	:	3.584	jiwa
Propinsi	:	KEP. BANGKA BELITUNG	Jumlah KK	:	891	KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

1	ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG		Numerik	
a.	Ketidakteraturan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah bangunan tidak teratur 	350	Unit
b.	Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan dg kepadatan 200/250 unit/ha < 	0,00	Ha
c.	Ketidakesesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah bangunan tdk sesuai teknis 	212	Unit
2	ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN			
a.	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Panjang jalan ideal Panjang jalan eksisting 	7.375,00	m'
			6.759,00	m'
b.	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Panjang jalan dengan permukaan rusak 	425,00	m'

3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM				
a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	▪ Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas	887	KK
b.	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	▪ Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup	890	KK
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN				
a.	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	▪ Luas kawasan yang terkena genangan	0,05	Ha
		▪ Panjang drainase ideal	9.692,00	m'
b.	Ketidakterediaan Drainase	▪ Panjang saluran drainase eksisting	5.752,00	m'
c.	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	▪ Panjang saluran tidak terakses ke sistem kota	952,00	m'
d.	Tidak perliharanya Drainase	▪ Panjang saluran drainase tidak terpelihara	1.802,00	m'
e.	Kualitas Konstruksi Drainase	▪ Panjang saluran drainase rusak	1.156,00	m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH				
a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	▪ Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar	891	KK
b.	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis	891	KK
6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
a.	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai standar teknis	600	KK

b.	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	600	KK
c.	Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah tdk terpelihara	319	KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN

a.	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	400	Unit
b.	Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	784	Unit

2.11.7. Data kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum Lokasi Kumuh Kota Pangkalpinang

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan	: 0	Luas SK	: 196,17	Ha
Kelurahan/Desa	: 14	Luas Verifikasi	: 196,19	Ha
Kecamatan	: 5	Jumlah Bangunan	: 5.051	Unit
Kab/Kota	: KOTA PANGKAL PINANG	Jumlah Penduduk	: 19.119	jiwa
Propinsi	: KEP. BANGKA BELITUNG	Jumlah KK	: 5.051	KK

DATA NUMERIK PARAMETER KECUMUHAN

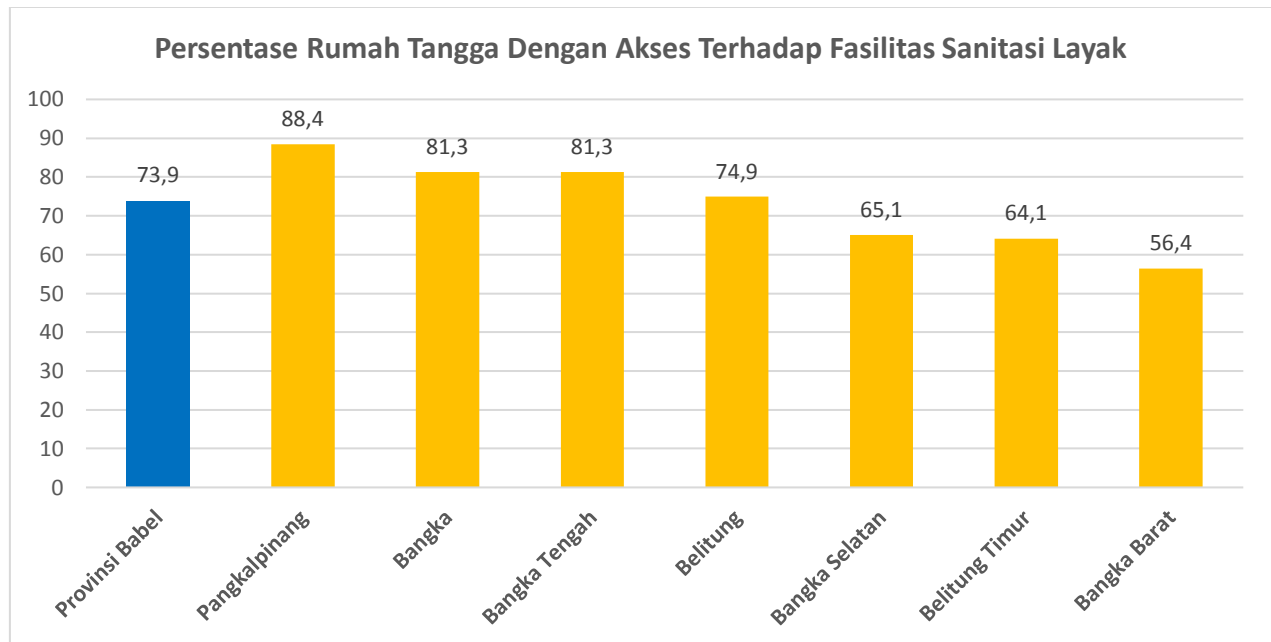
1	ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG		Numerik	
a.	Ketidakteraturan bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur	2.430	Unit
b.	Tingkat Kepadatan Bangunan	Luas kawasan dg kepadatan 200/250 unit/ha <	0,00	Ha
c.	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tdk sesuai teknis	655	Unit
2	ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN			
a.	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Panjang jalan ideal	56.217,45	m'
		Panjang jalan eksisting	47.008,22	m'

b.	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Panjang jalan dengan permukaan rusak 	<div>5.958,00</div> <div>9.209,23</div>	m'
3	ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM			
a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas 	<div>4.338</div>	KK
b.	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup 	<div>4.211</div>	KK
4	ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			
a.	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	<ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan yang terkena genangan 	<div>105,97</div>	Ha
		<ul style="list-style-type: none"> Panjang drainase ideal 	<div>66.537,62</div>	m'
b.	Ketidakterediaan Drainase	<ul style="list-style-type: none"> Panjang saluran drainase eksisting 	<div>36.695,29</div>	m'
c.	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Panjang saluran tidak terakses ke sistem kota 	<div>1.884,64</div>	m'
d.	Tidak perliharanya Drainase	<ul style="list-style-type: none"> Panjang saluran drainase tidak terpelihara 	<div>20.817,54</div>	m'
e.	Kualitas Konstruksi Drainase	<ul style="list-style-type: none"> Panjang saluran drainase rusak 	<div>3.507,07</div>	m'
5	ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH			
a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar 	<div>4.644</div>	KK
b.	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis 	<div>4.684</div>	KK
6	ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
a.	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai standar teknis 	<div>5.051</div>	KK
b.	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis 	<div>5.051</div>	KK

c.	Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah tdk terpelihara 	5.051	KK
7	ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARN			
a.	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran 	4.937	Unit
b.	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran 	5.045	Unit

2.12. Akses terhadap Sanitasi Layak

Gambar. 2.12. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak



2.13. Akses Air Minum

Tabel 2.13 Akses Air Minum

N o	KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JARINGAN PERPIPAAN (Jiwa)	%	NON PERPIPAAN	%	TERLAYAN AIR MINUM	%
1	Pangkalpinang	196.202	3.480	1,77	13.100	6,68	16.580	8,45
2	Bangka	311.085	14.659	4,71	19.500	6,27	34.159	10,98
3	Bangka Barat	196.598	5.672	2,89	5.400	2,75	11.072	5,63
4	Bangka Tengah	180.903	4.844	2,68	7.900	4,37	12.744	7,04
5	Bangka Selatan	193.583	3.266	1,69	4.700	2,43	7.966	4,12
6	Belitung	175.048	5.415	3,09	7.700	4,4	13.115	7,49
7	Belitung Timur	119.394	5.371	4,5	3.600	3,02	8.971	7,51
	Total Babel	1.372.813	42.707	21,33	61.900	29,9	104.607	7,6

2.14. Tipologi Perumahan dan Permukiman

Tabel 2.14. Tipologi Perumahan dan Permukiman

TIPOLOGI PERUMAHAN & PERMUKIMAN	Kondisi Bangunan	Jalan Lingkungan	Drainase	Air Minum	Air Limbah	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Perumahan dan permukiman di atas air	Bangunan rumah dengan sistem panggung dengan pondasi umpak atau pondasi dalam sesuai karakteristik bangunan	pondasi jalan dengan sistem cerucuk	sistem drainase lokal dilengkapi dengan pintu air	sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat <input type="checkbox"/> sistem distribusi jika menggunakan perpipaan,	unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan: <input type="checkbox"/> secara floating; atau <input type="checkbox"/> di bawah air memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air <input type="checkbox"/> unit pemipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka: <input type="checkbox"/> pipa sambungan dipasang	Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas air <input type="checkbox"/> Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi air
Perumahan dan permukiman di tepi air	Bangunan rumah dengan konsep <i>waterfront housing</i> , menjadikan kawasan perairan sebagai halaman depan	pondasi jalan: <input type="checkbox"/> pada sisi perairan dengan sistem cerucuk	sistem drainase lokal <input type="checkbox"/> jika permukaan daratan lebih tinggi dari air, maka dilengkapi dengan pintu air; atau	sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat	unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan: <input type="checkbox"/> secara <i>floating</i>	Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas air

TIPOLOGI PERUMAHAN & PERMUKIMAN	Kondisi Bangunan	Jalan Lingkungan	Drainase	Air Minum	Air Limbah	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Perumahan dan permukiman di dataran rendah	Bangunan menggunakan pondasi dangkal untuk bangunan sederhana dan pondasi dalam untuk bangunan tingkat	pondasi jalan dengan sistem konvensional □ memanfaatkan konstruksi perkerasan yang sesuai dengan daya dukung tanah	sistem drainase lokal dapat dilengkapi dengan pompa dan rumah pompa	sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam	unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah	Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas atas tanah □ Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi darat
Perumahan dan permukiman di perbukitan	bangunan rumah dengan sistem panggung dengan pondasi umpak untuk bangunan sederhana	pondasi jalan dengan sistem konvensional	sistem drainase lokal dapat dilengkapi dengan bangunan terjunan	sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan air tanah dalam	unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan: □ secara <i>floating</i> memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air; atau □ di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah	Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas atas tanah □ Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi darat
Perumahan dan		pondasi jalan:				

TIPOLOGI PERUMAHAN & PERMUKIMAN	Kondisi Bangunan	Jalan Lingkungan	Drainase	Air Minum	Air Limbah	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
permukiman di daerah rawan bencana	bangunan rumah dengan sistem panggung dengan pondasi umpak untuk bangunan sederhana	<input type="checkbox"/> pada kawasan kerawanan banjir (di atas air / di tepi air) dengan sistem cerucuk	<p>sistem drainase lokal dilengkapi dengan bangunan tertentu sesuai kerawanan bencana:</p> <p><input type="checkbox"/> banjir: berupa gorong-</p> <p>gorong dilengkapi dengan bronjong dan pintu air</p> <p><input type="checkbox"/> tsunami: berupa gorong-gorong dilengkapi dengan bronjong</p> <p><input type="checkbox"/> longsor: berupa bangunan terjunan</p>	sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam	<p>penempatan unit pengolahan air limbah setempat sesuai dengan kerawanan bencananya:</p> <p><input type="checkbox"/> rawan banjir dan tsunami: di bawah air,</p> <p>di atas air, atau di dalam tanah dengan memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air</p> <p><input type="checkbox"/> rawan longsor: di atas tanah dengan memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah</p> <p>yang dapat didukung dengan bangunan pelindung</p>	<p>Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas atas tanah</p> <p><input type="checkbox"/> Unit pengangkutan sampah disesuaikan dengan</p> <p>lokasinya:</p> <p><input type="checkbox"/> di perairan menggunakan moda transportasi air</p> <p><input type="checkbox"/> di daratan menggunakan moda transportasi darat</p>



Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi kepulauan Bangka Belitung
Sekretariat: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Gedung Juang, Jl. Pulau Mendanau No. 9 Komplek Perkantoran Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang